



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN TAHUNAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN TAHUN 2020



KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Allah SWT sehingga Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (Badan PPSDMP) dapat menyelesaikan Laporan Tahun 2020. Laporan ini merupakan bentuk dokumentasi pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Badan PPSDMP.

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan Grafikan kinerja Badan PPSDMP dalam melaksanakan kegiatan dan anggaran tahun 2020 dengan membandingkan target yang telah disusun dengan capaiannya dan realisasinya. Laporan ini sekaligus menjelaskan kendala dan permasalahan serta upaya-upaya penyelesaiannya.

Secara umum, target Program tahun 2020 dapat dicapai dengan baik, bahkan dalam kegiatan tertentu mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Namun demikian, kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya sehingga beberapa kegiatan belum sepenuhnya mencapai target. Hal ini menjadi catatan bagi Badan PPSDMP untuk dapat menyiapkan langkah-langkah antisipasi dan perbaikan kinerja dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan program dan anggaran tahun berikutnya.

Sistematika laporan terbagi dalam 6 (enam) bab, yaitu Bab I berisi Pendahuluan, Bab II menguraikan Organisasi dan Tata Kerja, Bab III menguraikan Program, Rencana, Realisasi Anggaran dan Kegiatan, Bab IV menguraikan Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut, Bab V Kesimpulan dan Saran serta Bab VI berisi Penutup.

Kami menyadari bahwa Laporan Tahunan Badan PPSDMP Tahun 2020 ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, masukan dan sumbang saran dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) demi dalam rangka perbaikan pelaksanaan kegiatan ke depan sangat di harapkan.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi bagi penyelesaian laporan ini. Kami berharap, laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja Badan PPSDMP pada masa yang akan datang.



Jakarta, Maret 2021
Kepala Badan,

Prof. Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr
NIP. 19640623 198903 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	3
C. Output	3
BAB II. ORGANISASI	4
A. Dasar Hukum dan Organisasi	4
B. Keragaan Sumber Daya Manusia	20
BAB III. RENCANA DAN REALISASI PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN	22
A. Program	22
B. Alokasi Anggaran dan kinerja	23
C. Perkembangan Capaian Realisasi Anggaran dan Kinerja Tahun 2015 – 2020 Badan PPSDMP.....	87
BAB IV. PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT.....	90
A. Permasalahan.....	90
B. Upaya Tindak Lanjut	92
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	95
BAB VI. PENUTUP	97

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 1.	Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Sasaran Program BPPSDMP Tahun 2020.....	23
Tabel 2.	Alokasi Anggaran Berdasarkan Kinerja Utama Tahun 2020...	24
Tabel 3.	Realisasi Anggaran Berdasarkan Kinerja Utama Tahun 2020.....	25
Tabel 4.	Alokasi dan Realisasi Anggaran Badan PPSDMP Berdasarkan Kegiatan Tahun 2020.....	26
Tabel 5.	Capaian Anggaran Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian Tahun 2020.....	28
Tabel 6.	Capaian Anggaran Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Tahun 2020	29
Tabel 7	Capaian Anggaran Program Pendidikan Pertanian Tahun 2020.....	30
Tabel 8.	Capaian Anggaran Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2020	31
Tabel 9.	Rencana Kinerja dan Target Sasaran Badan PPSDMP Tahun 2020	33
Tabel 10.	Sertifikasi Kompetensi lingkup BPPSDMP tahun 2020.....	37
Tabel 11.	Penumbuhan dan Penguatan P4S Tahun 2020.....	39
Tabel 12.	Peserta Diklat yang Meningkatkan Kompetensinya Tahun 2020.	43
Tabel 13.	Fasilitasi Prasarana dan Sarana Tahun 2020.....	48
Tabel 14.	Realisasi capaian Kinerja Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian.....	51
Tabel 15	Capaian Kinerja Pendidikan Pertanian	81
Tabel 16.	Capaian Kinerja Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	86
Tabel 17	Tingkat Efisiensi Kegiatan Badan PPSDMP Tahun 2020.....	87
Tabel 18.	Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran tahun 2015 sampai dengan tahun 2020.....	88

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1. Komposisi Pegawai Badan PPSDMP berdasarkan golongan	21
Grafik 2. Komposisi Pegawai Badan PPSDMP Berdasarkan Tingkat Pendidikan	21
Grafik 3. Komposisi Alokasi Anggaran Berdasarkan Kinerja Utama Tahun 2020.....	24
Grafik 4. Capaian Anggaran Berdasarkan Kinerja Utama Tahun 2020	25
Grafik 5. Capaian Anggaran Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian Tahun 2020.....	28
Grafik 6. Capaian Anggaran Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Tahun 2020.....	29
Grafik 7. Capaian Anggaran Program Pendidikan Pertanian Tahun 2020	31
Grafik 8. Capaian Anggaran Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan PPSDMP Tahun 2020.....	32
Grafik 9. Realisasi capaian Kinerja Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	52
Grafik 10. Capaian Kinerja Pendidikan Pertanian (Pendidikan Menengah Pertanian).....	81
Grafik 11. Capaian Kinerja Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	86
Grafik 12. Tingkat Efisiensi Kegiatan Badan PPSDMP Tahun 2020.....	87
Grafik 13. Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran tahun 2015 sampai dengan tahun 2020.....	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi saat Pertemuan Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan Semester I Tahun 2020, di Horison Ultima Bhuvana-Ciawi Bogor, (29/6) yang diikuti 10 kepala UPT Pusat Pelatihan Pertanian lingkup BPPSDMP.....	35
Gambar 2. Kementan meningkatkan kualitas vokasi pertanian melalui pembangunan Smart Green House di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor Tahun 2020..	35
Gambar 3. Badan PPSDM Pertanian Cetak Pengusaha Pertanian Milenial Garut. 18 Januari 2020 melalui Pelatihan Vokasi .	36
Gambar 4. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Bustanul Arifin Caya dalam sambutannya saat memberikan arahan pada kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Sertifikasi Berbasis Online di Serpong, Banten Jumat, 14 Februari 2020	38
Gambar 5. ‘Sosialisasi Pengembangan dan Penyusunan Perangkat Sertifikasi Profesi Sektor Pertanian’ di Serpong, Banten, 28 April 2020 yang dihadiri 50 asesor sektor pertanian	38
Gambar 6. Melalui P4S, BPPSDMP Kementan Cetak SDM Pertanian Unggul Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, Dedi Nursyamsi di sela launching Eduwisata Green House di Polbangtan Bogor, Senin 14 Desember 2020.....	41
Gambar 7. Pembukaan jambore Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya atau P4S.Kegiatan yang dilaksanakan tanggal 25 sampai dengan 27 Pebruari 2020, digelar di bale tani, kecamatan Bareng, kabupaten Jombang dengan diikuti 148 peserta.....	42
Gambar 8. PPMKP Ciawi Tanggal 12 Agustus 2020 Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVII Tahun 2020. Diikuti 60 peserta lintas instansi kegiatan dibuka ,Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).....	45
Gambar 9. Pusat Pelatihan Melaksanakan Pertemuan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Program READSI Tahun 2020. tanggal 15 sampai dengan 17 Agustus 2019 di Hotel The Royal Surakarta Heritage Solo Jawa Tengah.....	46

Gambar 10.	Kepala Pusat Pelatihan Pada Tanggal 4 Maret 2020 di DPRD Kolaka Utara Siap Dukung Kostratani dan READSI.....	47
Gambar 11.	Kabupaten Pandeglang provinsi Banten menerima 17 paket information technology (IT) yang disalurkan Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Tahun 2020	50
Gambar 12.	Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian tahun 2020 di Hotel Padjadjaran Bogor 28 – 30 Januari 2020 oleh Kepala BPPSDMP Kementan Prof Dedi Nursyamsi	53
Gambar 13.	Proses Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)	54
Gambar 14.	Kepala Pusluhtan, Leli Nuryati Membuka Kegiatan Bimbingan Teknis KEP/Korporasi Petani Bagi Petugas Pendampingan di Lokasi Kostratani serta Konsolidasi Tim Verifikasi dan validasi dan Simluhtan Pusat dan Provinsi, di Hotel NEO Surabaya, 25 – 27 Februari 2020	55
Gambar 15.	Kementan Pada Tanggal 06 April 2020 Jadikan Petani Sumenep sebagai Andalan dan Perkuat Ekonomi Desa	56
Gambar 16.	Pertemuan Sistem Pengendalian Intern Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian dan Forum Koordinasi Proyek SIMURP di Hotel Permata Bogor, 12 – 14 Maret 2020	60
Gambar 17.	Pertemuan Evaluasi ToF dan ToT SIMURP Kementan Berbasis CSA, 21-22 Desember 2020	60
Gambar 18.	ToF Climate Smart Agriculture (CSA) SIMURP di Kecamatan Pagaden, Subang 14-16 September 2020	60
Gambar 19.	Workshop Rekonsiliasi Keuangan On-Granting IPDMIP Triwulan III Tahun Anggaran 2020 di Hotel Aston Mataram, 21 Oktober 2020	62
Gambar 20.	Pre-test bagi para Peserta Sekolah Lapangan(SL) IPDMIP di Desa Sagalaherang Kecamatan Panawangan memasuki tahap lanjutan, tanggal 09 September 2020.....	62
Gambar 21.	Kunjungan Kerja dalam rangka Penguatan Tugas, Fungsi BPP serta Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Mendukung Percepatan Program Pembangunan Pertanian di Kabupaten Lamongan, 18 September 2020	63
Gambar 22.	Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pendidikan Vokasi Pertanian Tahun 2020 di Hotel Arch, Bogor 19 – 21 Januari 2020	65

Gambar 23.	Launching Smart Green House di Polbangtan Bogor untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan Vokasi Pertanian, 15 Desember 2020	65
Gambar 24.	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tugas Belajar Program Magister dan Doktor, Kota Batu, Malang, Jawa Timur, 23 April 2020	66
Gambar 25.	Rapat Koordinasi Teknis Pendidikan Vokasi Pertanian Tahun 2020 Dilaksanakan Pada Tanggal 19-21 Januari 2020 di Hotel Arch Bogor	69
Gambar 26.	Pembukaan kegiatan persiapan pembelajaran semester genap tahun akademik 2019/2020 di Grand Asana Pangrango Hotel, Bogor, 07-09 Februari 2020.....	70
Gambar 27.	Rapat Koordinasi Pendampingan Mahasiswa/Alumni di Sentra Produksi Pangan dan Program Pengabdian Masyarakat di Kawasan Perbatasan Tahun 2020, 19-21 Februari 2020 di Hotel Platinum Yogyakarta	71
Gambar 28.	Petani dan penyuluh tanam padi di kawasan perbatasan Kabupaten Keerom Yang untuk mendukung Ekspor Pangan ke Negara Tetangga	71
Gambar 29.	Tarik Minat Milenial Jadi Petani Lewat Kegiatan Wirausaha Muda Pertanian, Yogja Tahun 2020	73
Gambar 30.	Sekretaris BPPSDMP Kementan, Siti Munifah saat berkunjung ke kebun petani milenial di Sumba Barat Daya, NTT. 12 November 2020	74
Gambar 31.	Pelatihan persiapan uji sertifikasi profesi bagi para siswa kelas XII SMK-PP Banjarbaru April 2020	75
Gambar 32.	SMKPP Negeri Kupang Optimis Lahirkan Generasi Pertanian dari Timur Indonesia Tahun 2020	75
Gambar 33.	Sarana Prasarana SMK-PP Sembawa	76
Gambar 34.	Sosialisasi KostraTani di BPP Pacet, Kabupaten Cianjur yang merupakan BPP Model Percontohan dari Youth Entrepreneurship and Employment Support Services Programme [YESS] di Cianjur, Jabar pada tanggal 24 Juli 2020.....	79
Gambar 35.	Program YESS, Lahirkan Wirausahawan Muda Pertanian di Perdesaan.....	79

Gambar 36.	Sekretaris Badan, Dr. Ir. Siti Munifah, M.Si menyebutkan ada lima pertemuan sekaligus dalam kesempatan ini, diantaranya Rapat Teknis Perencanaan, Workshop Tim SPI, Workshop Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan, Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanian dan Workshop Penderasan Arus Informasi Pembangunan Pertanian Yogyakarta pada 24 s.d 26 Februari 2020	82
Gambar 37.	Dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM Pengelola Keuangan lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Sekretariat Badan PPSDMP mengadakan Workshop Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Semester II TA 2019, S di Hotel Grand Mulya, Sukaraja Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin 21 Januari 2020	83
Gambar 38.	Koordinasi Pengelolaan Aplikasi Kepegawaian Berbasis On-Line, Semarang 11 – 13 Maret 2020	83
Gambar 39.	Serah Terima Jabatan di PPMKP Ciawi – Bogor, 05 Juni 2020	83
Gambar 40.	Rapat Koordinasi dalam rangka Konsolidasi dan Evaluasi Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Badan PPSDMP 2020, (Bogor, 26 – 28 November 2020)	84
Gambar 41.	Rapat Pimpinan Tahun 2020, (Garut, 16 – 18 Januari 2020)	85
Gambar 42.	Digitalisasi Informasi Lingkup Badan Tahun 2020	85

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Struktur Organisasi Badan PPSDMP.....	100
Lampiran 2. Data Kepegawaian Badan PPSDMP.....	101
Lampiran 3. Data Jabatan Fungsional	102

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Pertanian menetapkan sasaran pembangunan pertanian jangka menengah 2020-2024 yakni Kementerian Pertanian yang andal, profesional, inovatif dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Ke depan, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sektor pertanian diharapkan berkontribusi besar terhadap peningkatan sasaran makro pembangunan. Pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat rata-rata 5,7-6,0% per tahun, yang didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas SDM.

Salah satu kunci untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam lima tahun ke depan adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional, mandiri, berdayasaing dan berjiwa wirausaha. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) sebagai unit kerja Eselon I di Kementerian Pertanian yang memiliki mandat untuk menyiapkan SDM pertanian yang professional, mandiri, berdayasaing dan berjiwa wirausaha.

Strategi utama untuk mencapai sasaran umum kebijakan BPPSDMP jangka menengah 2020-2024, dijabarkan pada 3 (tiga) Program Aksi BPPSDMP tahun 2020-2024, yaitu: (1). Gerakan Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani), (2) Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi mendukung Penumbuhan Pengusaha Pertanian Milenial, dan (3) Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi mendukung Program Utama Kementerian Pertanian. Program aksi BPPSDMP tahun 2020-2024 ini mendukung semua program utama Kementerian Pertanian, yaitu: (1) Pengembangan Kostratani dan pembangunan SDM pertanian melalui pendidikan dan pelatihan vokasi; (2) Fasilitasi Pembiayaan, Infrastruktur, dan Alsintan; (3) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Berbasis Korporasi; (4) Pengembangan Kawasan Hortikultura Berdayasaing; (5) Gerakan Peningkatan Produksi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Perkebunan; (6) Peningkatan populasi, produktivitas dan mutu genetik ternak potong/unggas; (7) Akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi dan produksi benih/bibit; (8) Pengentasan daerah rentan pangan (*family farming*, Pertanian Masuk Sekolah, diversifikasi pangan) serta distribusi dan pengendalian harga pangan pokok; serta (9) Penguatan layanan perkarantina dan akselerasi ekspor melalui program Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor.

Badan PPSDMP menyelenggarakan dua fungsi yaitu ekonomi dan pendidikan. Untuk menjalankan fungsi ekonomi, Badan PPSDMP melaksanakan program peningkatan penyuluhan pertanian, dan pelatihan pertanian. Fungsi pendidikan dilaksanakan melalui program pendidikan pertanian. Mengacu pada program tersebut, pelaksanaannya dilakukan melalui 4 strategi utama yaitu: (1) Pemantapan sistem penyuluhan pertanian terpadu dan modern, (2) Pemantapan sistem pendidikan vokasi pertanian yang kompetitif, (3) Pemantapan sistem pelatihan vokasi pertanian berbasis kompetensi dan daya saing, serta (4) Pemantapan reformasi birokrasi.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Badan PPSDMP ditopang oleh tiga pilar yaitu pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan pertanian dimana kelembagaan ketiga pilar tersebut tersebar di seluruh Indonesia yang cukup memadai diperkuat dengan ketenagaan baik tenaga fungsional umum maupun tenaga fungsional khusus, serta didukung administrasi manajemen dan teknis lainnya. Badan PPSDMP terdiri atas Pusat Penyuluhan Pertanian, Pusat Pendidikan Pertanian, Pusat Pelatihan Pertanian, dan Sekretariat Badan. Selain itu, Badan PPSDMP didukung pula oleh Unit Pelaksana Teknis, Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP), Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan), Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP), Balai Pelatihan Pertanian (BPP), dan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP).

Visi dan Misi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

a. Visi

Badan PPSDMP telah menetapkan visi pada Tahun 2020-2024 yaitu *“Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pertanian yang Profesional, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berjiwa Wirausaha dalam Mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri dan Modern”*.

b. Misi

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) menetapkan Misi (strategi utama), yaitu:

1. Memantapkan sistem penyuluhan pertanian terpadu dan modern;
2. Memantapkan pendidikan vokasi pertanian yang kompetitif;
3. Memantapkan sistem pelatihan vokasi pertanian berbasis kompetensi dan daya saing; dan memantapkan reformasi birokrasi

Untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian harus diselenggarakan secara konsisten dan berkelanjutan, baik di pusat maupun di daerah. Keberagaman hasil penyelenggaraan kegiatan tersebut, wajib dilaporkan kepada para pemangku kepentingan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi. Berkaitan dengan

pertanggungjawaban kinerja tahun 2020, maka disusun **Laporan Tahunan Badan PPSDMP**.

B. Tujuan

Penyusunan **Laporan Tahunan** bertujuan untuk memberikan informasi penyelenggaraan Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani yang diwujudkan melalui serangkaian kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM Pertanian selama tahun 2020.

C. Output

Output laporan tahunan berupa dokumen yang berisi informasi mengenai penyelenggaraan program dan kegiatan Badan PPSDMP selama tahun 2020, meliputi: rencana dan realisasi program, kegiatan, anggaran, permasalahan dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan pada tahun mendatang.

BAB II ORGANISASI

A. Dasar Hukum dan Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas Badan PPSDMP adalah menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Badan PPSDMP mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
2. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
3. Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan pertanian;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan pertanian;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan pendidikan, dan pelatihan sumber daya manusia pertanian;
7. Pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PERTANIAN



Kepala Badan PPSDMP
Prof. Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr



Sekretaris Badan PPSDMP
Dr. Ir. Siti Munifah, M.Si



Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian

Dr. Ir. Leli Nuryati, M.Sc



Kepala Pusat Pelatihan Pertanian

Ir. Bustanul Arifin Caya M.DM



Kepala Pusat Pendidikan Pertanian

Dr. Idha Widi Arsanti, SP, MP

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan PPSDMP di Pusat, didukung oleh empat unit kerja Eselon II dan UPT yaitu :

1. Pusat Penyuluhan Pertanian;
2. Pusat Pelatihan Pertanian;
3. Pusat Pendidikan Pertanian
4. Sekretariat Badan PPSDMP.
5. Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi Jawa Barat;
6. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan Sumatera Utara;
7. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor Jawa Barat;
8. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Magelang Jawa Tengah;
9. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang Jawa Timur;
10. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Gowa Sulawesi Selatan;
11. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Manokwari Papua Barat;
12. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang Jawa Barat;
13. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara Jawa Barat;
14. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan Jawa Timur;
15. Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu Jawa Timur;
16. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang Kalimantan Selatan;
17. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku Sulawesi Selatan;
18. Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang Nusa Tenggara Timur;
19. Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi;
20. Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung;
21. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri (SMK-PPN) Sembawa Sumatera Selatan;
22. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri (SMK-PPN) Banjarbaru Kalimantan Selatan;
23. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri (SMK-PPN) Kupang Nusa Tenggara Timur.

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015, tentang Kementerian Pertanian, maka diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi Kementerian Pertanian dari masing-masing pusat dan UPT adalah sebagai berikut :

1. Pusat Penyuluhan Pertanian

Pusat Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis serta penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;

- b. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyuluhan pertanian;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyuluhan pertanian;
- d. Pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian; *dan*
- e. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian.

2. Pusat Pelatihan Pertanian

Pusat Pelatihan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, serta penyelenggaraan pelatihan pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Pelatihan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan kerjasama serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan pertanian;
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pelatihan pertanian;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelatihan pertanian;
- d. Pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan pertanian;
- e. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan pendidikan pertanian; *dan*
- f. Penyusunan dan pengembangan standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian.

3. Pusat Pendidikan Pertanian

Pusat Pendidikan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, serta penyelenggaraan pendidikan pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Pendidikan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan kerja sama serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan pertanian;
- b. Pelaksanaan pengkajian sumber daya manusia pertanian;
- c. Penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan pertanian;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan pertanian;
- e. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan pertanian; *dan*
- f. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan pendidikan pertanian.

4. Sekretariat Badan

Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi, penyusunan, rencana, program dan anggaran serta kerjasama di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;

- b. Pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan;
- c. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan urusan kepegawaian;
- d. Evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

5. Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor : 100/Permentan/OT.140/10/2015 tentang organisasi dan tata kerja Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia bagi aparatur dan non aparatur pertanian, pelatihan prajabatan, dan pelatihan fungsional non rumpun ilmu hayat pertanian bagi aparatur pertanian, serta mengembangkan model dan teknik pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, PPMKP menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang manajemen dan kepemimpinan serta fungsional non rumpun ilmu hayat pertanian;
- d. Pelaksanaan pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia bagi aparatur dan non aparatur dalam dan luar negeri;
- e. Pelaksanaan pelatihan prajabatan bagi aparatur;
- f. Pelaksanaan pelatihan fungsional non rumpun ilmu hayat pertanian bagi aparatur;
- g. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
- h. Pelaksanaan uji kompetensi bidang manajemen dan kepemimpinan pertanian bagi aparatur
- i. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan manajemen dan kepemimpinan, serta fungsional non rumpun ilmu hayat pertanian;
- j. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan di bidang manajemen kepemimpinan dan multimedia pertanian;
- k. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- l. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang manajemen, kepemimpinan, dan multimedia pertanian;

- m. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
- n. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan serta pengembangan model dan teknis pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia pertanian;
- o. Pengelolaan unit inkubator manajemen;
- p. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang manajemen, kepemimpinan, dan multimedia pertanian;
- q. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- r. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis dan unit multi media pertanian.
- s. Pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan serta instansi PPMKP

6. Politeknik Pembangunan Pertanian (Medan, Yogyakarta-Magelang, Malang, Gowa, Manokwari)

Tugas Pokok Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) adalah melaksanakan penyelenggaraan pendidikan profesional di bidang penyuluhan pertanian dan peternakan, serta pendidikan dan pelatihan fungsional rumpun ilmu hayat pertanian. Polbangtan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan dan pengembangan program pendidikan profesional penyuluhan pertanian dan peternakan;
- b. Pelaksanaan penelitian terapan penyuluhan pertanian dan peternakan;
- c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pelaksanaan pembinaan civitas dan hubungan dengan lingkungannya;
- e. Pelaksanaan administrasi umum, akademik dan kemahasiswaan;
- f. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dasar fungsional rumpun ilmu hayat pertanian;
- g. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan alih kelompok fungsional rumpun ilmu hayat pertanian.

Badan PPSDMP, Kementerian Pertanian melalui Pusat Pendidikan Pertanian, menyelenggarakan lembaga pendidikan pertanian yaitu STPP yang saat ini bertransformasi menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian. Transformasi ini merupakan tindak lanjut dari Undang-undang Pendidikan Tinggi Pertanian No. 12 tahun 2012 mengenai pendidikan vokasi pertanian. Sejak tahun 2018, Sekolah tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) telah beralih menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian, melalui penetapan Menteri Pertanian RI No.25/Permentan/OT.020/5/2018 tentang organisasi dan tata kerja Politeknik Pembangunan Pertanian. Penetapan tanggal 28 Mei 2018 dan peraturan Menteri Pertanian RI nomor 36/Permentan/SM.220/ 8/2018 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian dan Peraturan tanggal 17 Agustus 2018. Arah politeknik pembangunan saat ini adalah mewujudkan Politeknik Pembangunan Pertanian

Unggul dalam menyiapkan SDM Pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani menuju Indonesia lumbung pangan dunia tahun 2045.

7. Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 101/Permentan/OT.140/10/2013, Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian/ peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian. BBPP Lembang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang hortikultura bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang hortikultura bagi aparatur dan non aparatur;
- g. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian;
- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
- i. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang hortikultura;
- j. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- k. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian
- l. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
- m. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- n. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian;
- p. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- q. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- r. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPP Lembang.

8. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 107/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Organisasi dan Tatakerja, Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang kesehatan hewan (keswan) dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) bagi aparatur dan nonaparatur pertanian. BBPKH Cinagara menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur dan non aparatur;
- g. Pelaksanan uji kompetensi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- i. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- j. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- k. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- l. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur dan non aparatur;
- m. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- n. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- p. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- q. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- r. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPKH Cinagara.

9. Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 103/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 9 Oktober tahun 2013 sebagai penyempurnaan Permentan Nomor : 17/Permentan/OT.140/02/2007 tanggal 19 Februari 2007, Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian. BBPP Ketindan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang tanaman pangan dan tanaman obat bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang tanaman pangan dan tanaman obat bagi aparatur dan non aparatur;
- g. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian;
- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
- i. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang tanaman pangan dan tanaman obat;
- j. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- k. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian;
- l. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
- m. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- n. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang peternakan;
- p. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- q. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- r. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPP Ketindan.

10. Balai Besar Pelatihan Pertanian Batu

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 105/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Organisasi dan Tatakerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Batu mempunyai tugas melaksanakan

pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan bagi aparatur dan nonaparatur pertanian. BBPP Batu menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang peternakan;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang peternakan bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang pasca panen dan pengolahan hasil ternak bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang pasca panen dan pengolahan hasil ternak bagi aparatur dan non aparatur;
- g. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang peternakan;
- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan;
- i. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pasca panen dan pengolahan hasil ternak;
- j. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- k. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang peternakan;
- l. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur;
- m. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- n. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang peternakan;
- p. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- q. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- r. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPP Batu.

11. Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang

Berdasarkan peraturan Menteri Pertanian nomor : 49/Permentan/ OT.140/9/2011 tanggal 06 September 2011 Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 104/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 09 Oktober 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang, mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian. BBPP Binuang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang perkebunan dan teknologi lahan pasang surut bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang perkebunan dan teknologi lahan pasang surut bagi aparatur dan non aparatur;
- g. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian;
- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
- i. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang perkebunan dan teknologi lahan pasang surut;
- j. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- k. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian;
- l. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
- m. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- n. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian;
- p. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- q. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- r. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPP Binuang.

12. Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 106/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Organisasi dan Tatakerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian. BBPP Batangkaluku menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;

- e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang mekanisasi pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang mekanisasi pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
- g. Pelaksanan uji kompetensi di bidang pertanian;
- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
- i. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang mekanisasi pertanian;
- j. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- k. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian;
- l. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
- m. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- n. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian;
- p. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- q. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- r. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPP Batangkaluku.

13. Balai Besar Pelatihan Pertanian Kupang

Balai Besar Pelatihan Pertanian Kupang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan bagi aparatur dan nonaparatur pertanian. BBPP Kupang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang peternakan;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang peternakan bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang ternak potong dan teknologi lahan kering bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang bidang ternak potong dan teknologi lahan kering bagi aparatur dan non aparatur;
- g. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang peternakan;
- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan;

- i. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang ternak potong dan teknologi lahan kering;
- j. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- k. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang peternakan;
- l. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur;
- m. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- n. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang peternakan;
- p. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- q. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- r. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPP Kupang.

14. Balai Pelatihan Pertanian Jambi

Balai Pelatihan Pertanian Jambi mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian. BPP Jambi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang perkebunan dan teknologi lahan rawa bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang perkebunan dan teknologi lahan rawa bagi aparatur dan non aparatur;
- g. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian;
- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
- i. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- j. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian;
- k. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur;
- l. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- m. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;

- n. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian;
- o. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- p. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- q. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan instalasi BPP Jambi.

15. Balai Pelatihan Pertanian Lampung

Balai Pelatihan Pertanian Lampung mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian. BPP Lampung menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura dataran rendah bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang tanaman pangan dan hortikultura dataran rendah bagi aparatur dan non aparatur;
- g. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian;
- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
- i. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- j. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian;
- k. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur;
- l. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- m. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- n. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian;
- o. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- p. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- q. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan instalasi BPP Lampung.

16. Sekolah Menengah Kejuruan Penyuluhan Pertanian Negeri (Sembawa, Banjarbaru, Kupang)

Sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian Nomor. 110/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Organisasi dan

tata kerja SMK-PPN, Berdasarkan Permentan Nomor 110/Permentan/OT.140/10/2013, Sekolah Menengah Kejuruan Penyuluhan Pertanian Negeri mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan mengembangkan metodologi pembelajaran pendidikan menengah kejuruan bidang pertanian. SMK-PPN menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran, dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan proses belajar mengajar;
- c. Pelaksanaan kegiatan ko-kurikuler;
- d. Pelaksanaan kegiatan ekstra-kurikuler;
- e. Pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi peserta didik;
- f. Pelaksanaan pengembangan metodologi pembelajaran dan bahan ajar bidang pertanian;
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis penerapan metodologi pembelajaran bidang pertanian bagi pendidik;
- h. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai program pembangunan pertanian;
- i. Pengelolaan unit usaha sebagai sarana pembelajaran bagi peserta didik;
- j. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan;
- k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- l. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan instalasi SMK-PPN.

17. Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI)

Dalam rangka mendukung pembangunan pertanian Indonesia dan rencana strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian maka ditetapkan tujuan dari PEPI yaitu menghasilkan sumber daya manusia profesional, mandiri dan berdaya saing di bidang enjiniring pertanian.

Berdasarkan Statuta Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia, PEPI didirikan pada tanggal 25 Juni 2019.

Dalam menjalankan tugasnya PEPI Serpong berpedoman pada tujuan, tugas dan fungsi yang diembannya. Tujuan didirikannya PEPI Serpong adalah :

- 1) Menghasilkan tenaga terampil bidang pertanian dan wirausahawan muda yang profesional, kompeten, berdaya saing dan berkarakter untuk mewujudkan regenerasi petani.
- 2) Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan dengan meningkatkan kompetensi di bidang pertanian.
- 3) Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan pertanian yang berwawasan lingkungan.
- 4) Mengembangkan pembelajaran dengan system teaching factory.
- 5) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan berbasis teknologi.
- 6) Mengembangkan Lembaga Pendidikan sebagai tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang pertanian dan Lembaga Sertifikasi Profesi.

- 7) Mengembangkan Lembaga Pendidikan sebagai tempat pelatihan bidang pertanian dan agrowisata untuk meningkatkan minat terhadap dunia pertanian.
- 8) Melakukan kemitraan dengan kelompok tani dan DU/DI.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian RI No. 28 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia dan Peraturan Menteri Pertanian RI No. 37 tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia, maka Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana, program, anggaran, dan kerja sama pendidikan.
- b. Pelaksanaan pendidikan tinggi vokasi pertanian.
- c. Pelaksanaan penelitian terapan bidang pertanian
- d. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Pengelolaan administrasi akademik, kemahasiswaan dan alumni.
- f. Pengelolaan administrasi umum.
- g. Pengelolaan *teaching factory/ teaching farm*, teknologi informasi dan komunikasi, asrama.
- h. Pembinaan civitas akademika dan hubungan dengan lingkungan.
- i. Pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan.
- j. Pelaksanaan sistem pengawasan internal.
- k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

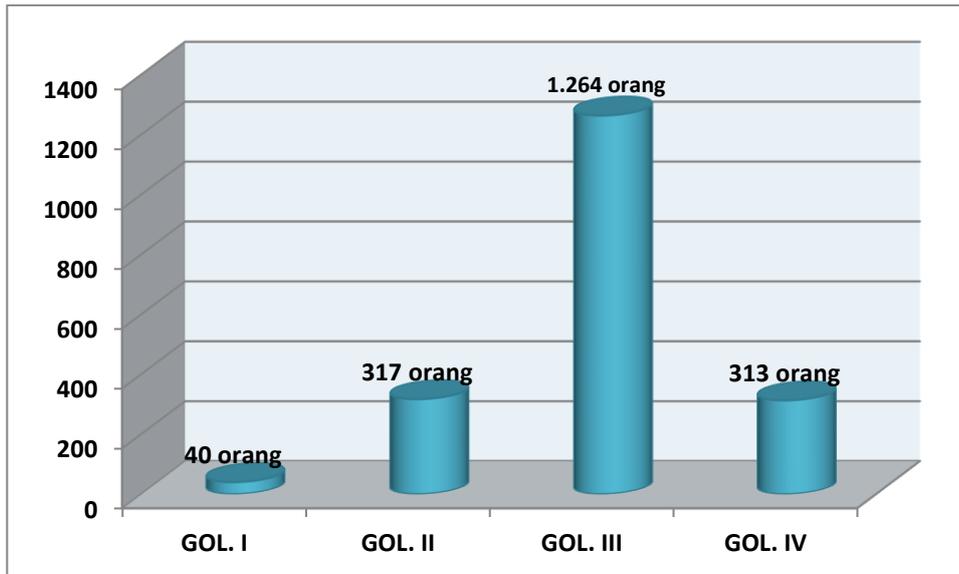
B. Keragaan Sumber daya Manusia

Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2020 Badan PPSDMP didukung oleh **1.934** orang aparat yang terdiri atas 1.194 orang aparat laki-laki dan 740 aparat perempuan.

Komposisi pegawai Badan PPSDMP pada tahun 2020 berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan secara rinci adalah sebagai berikut :

1. Golongan

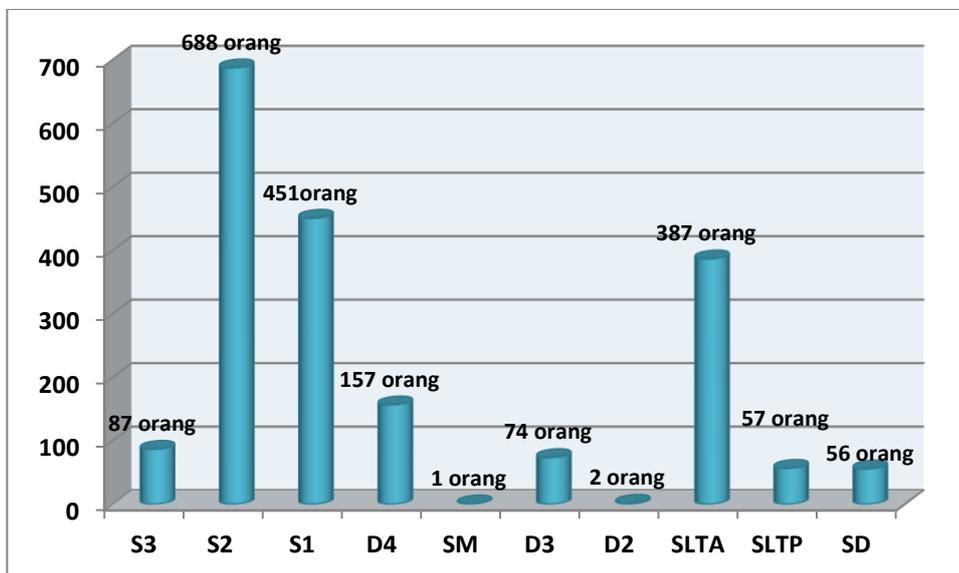
Rincian menurut golongan terdiri : golongan I yaitu 40 orang; golongan II yaitu 317 orang; golongan III yaitu 1.264 orang, dan golongan IV yaitu 313 orang. Persentase pegawai Badan PPSDMP tertinggi adalah pada golongan III yaitu 65%, sedangkan yang terendah adalah pada golongan I yaitu 2%. Komposisi pegawai Badan PPSDMP tahun 2020.



Grafi 1. Komposisi Pegawai Badan PPSDMP Berdasarkan Golongan Tahun 2020

2. Pendidikan

Rincian menurut pendidikan terdiri : S3 (Doktor) sebanyak 87 orang, S2 (magister) yaitu 688 orang, S1 (sarjana) yaitu 451 orang, D4 yaitu 157 orang, SM yaitu 1 orang, D3 yaitu 74 orang, D2 yaitu 2 orang, SLTA yaitu 387 orang, SLTP yaitu 57 orang dan SD yaitu 56 orang. Komposisi pegawai Badan PPSDMP tahun 2020.



Grafik 2. Komposisi Pegawai Badan PPSDMP Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

BAB III

RENCANA DAN REALISASI PROGRAM

KEGIATAN DAN ANGGARAN

A. Struktur Program

Dalam menjalankan fungsi gandanya, Badan PPSDMP tahun 2020 mengampu dua program, yaitu (1) Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian (implementasi fungsi ekonomi); dan (2) Program Pendidikan Pertanian (implementasi fungsi pendidikan).

Kedua program ini fokus pada peningkatan efektivitas penyuluhan dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional. Dengan fungsi ganda tersebut, tahun 2020 Badan PPSDMP melaksanakan kegiatan:

1. Program Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian;
2. Program Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian;
3. Program Pendidikan Tinggi Pertanian dan Pendidikan Menengah Pertanian (SMKPP)
4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sdm Pertanian.

Kegiatan berdasarkan fungsi di atas dijabarkan dalam beberapa kegiatan utama, meliputi:

- 1) Pelatihan teknis mendukung program prioritas
- 2) Sertifikasi Profesi bidang Pertanian
- 3) Fasilitasi Insentif Kinerja Penyuluh PNS dan THL-TBPP
- 4) Sarana Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian
- 5) Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dan Korporasi Petani
- 6) Pengembangan kerjasama dalam negeri dan luar negeri
- 7) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian
- 8) Peningkatan Kualitas Pemuda Tani
- 9) Pemantapan sistem perencanaan dan kerjasama
- 10) Penguatan pengelolaan keuangan dan perlengkapan yang akuntabel
- 11) Peningkatan kualitas layanan organisasi, hukum, kepegawaian, TU dan Rumah Tangga
- 12) Penguatan sistem evaluasi pelaporan dan kehumasan

Dalam menjalankan program dan kegiatan Badan PPSDMP menetapkan target dan sasaran yang disesuaikan dengan sumberdaya yang dimiliki. Agar mudah dalam menyusun perencanaan sekaligus terukur capaiannya, ditetapkan indikator kinerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)

digunakan sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan PPSDMP.

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Sasaran Program BPPSDMP Tahun 2020

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	IKU/IKSP
1	Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	Termanfaatkannya teknologi pertanian Meningkatnya kualitas SDM dan Kelembagaan Pertanian Nasional	Petani yang menerapkan Teknologi (%) Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya (%) Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (%)
		Birokrasi BPPSDMP yang efektif dan efisien	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPPSDMP Aspek Pemenuhan dan Reform (Nilai)
		Terkelolanya anggaran BPPSDMP yang akuntabel dan berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMP (Nilai)
2	Pendidikan Pertanian	Meningkatnya SDM dan Kelembagaan Pertanian Nasional	Persentase lulusan Pendidikan Vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian (%)

B. Alokasi Anggaran dan Kinerja

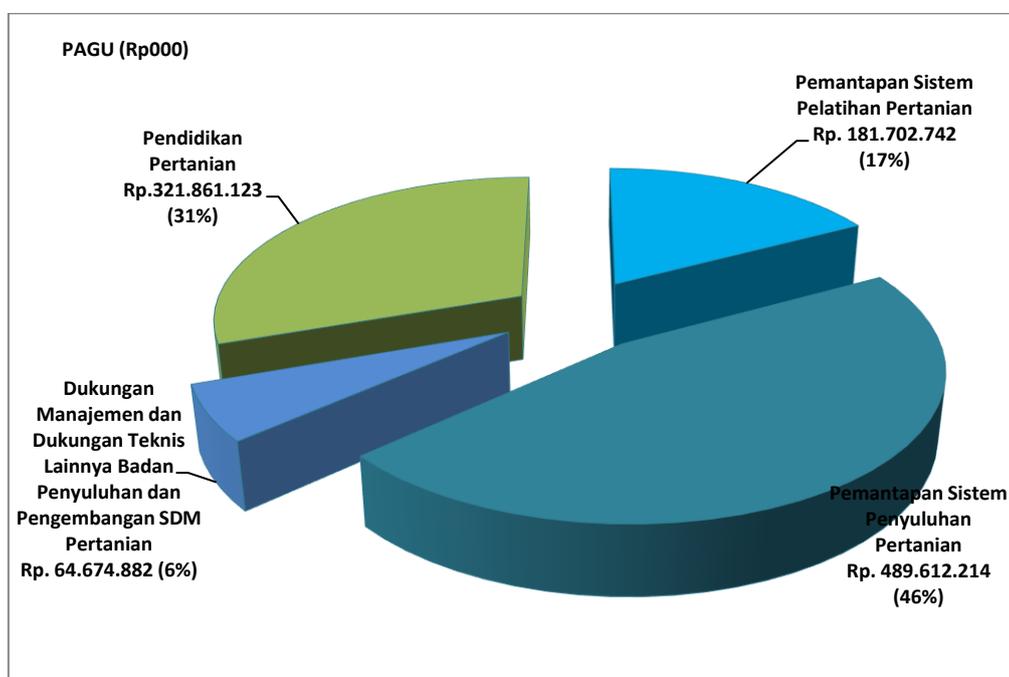
1. Alokasi Anggaran

Anggaran tahun 2020 dialokasikan dalam rangka mewujudkan program dan kegiatan Badan PPSDMP yang secara operasional dilaksanakan oleh unit kerja eselon II lingkup Badan PPSDMP, yaitu: Pusat Penyuluhan Pertanian, Pusat Pelatihan Pertanian, Pusat Pendidikan Pertanian, serta Sekretariat Badan PPSDMP. Selain itu anggaran ditujukan untuk 20 Satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat, 34 Satuan Kerja (Satker) Dekonsentrasi Pemerintah Daerah di Tingkat Provinsi (Dinas/Badan), serta 8 Satker Tugas Pembantuan Pemerintah Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota (Dinas/Badan).

Pagu Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2020 sebesar **Rp. 1.057.850.961.000,-**. Adapun komposisi anggaran berdasarkan kinerja utama ditampilkan pada Tabel 2 dan Grafik 3.

Tabel 2.
Alokasi Anggaran Berdasarkan Kinerja Utama Tahun 2020

NO	KINERJA	PAGU (Rp)
1	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	181.702.742.000
2	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	489.612.214.000
3	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	64.674.882.000
4	Pendidikan Pertanian	321.861.123.000
TOTAL		1.057.850.961.000

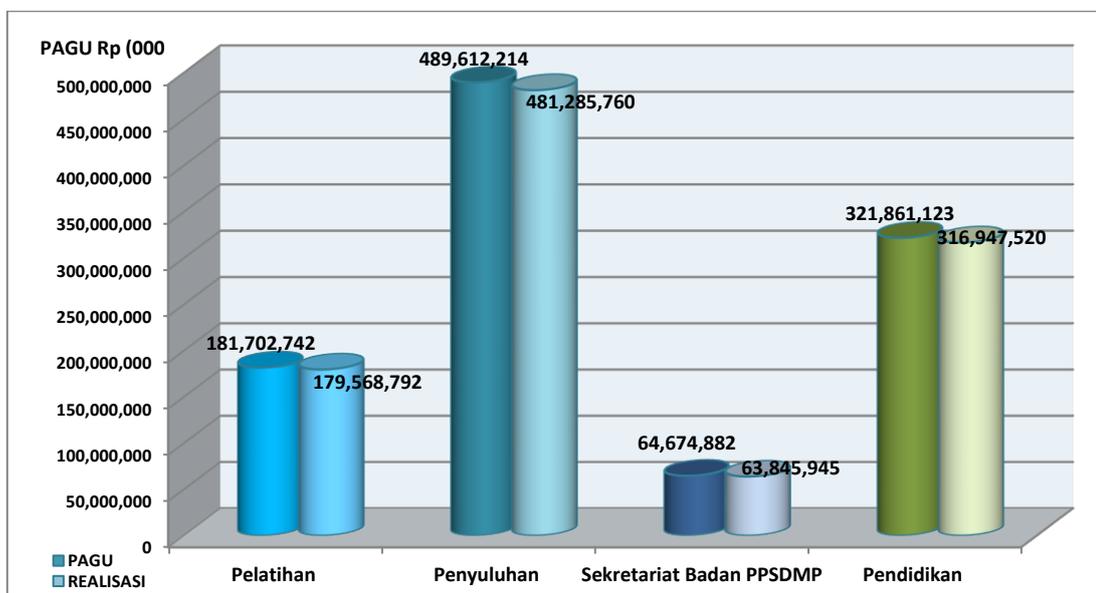


Grafik 3. Alokasi Anggaran Berdasarkan Kinerja Utama Tahun 2020

Secara keseluruhan realisasi anggaran berdasarkan kinerja utama Badan PPSDMP Tahun 2020 sebesar **98,61%** atau mencapai **1.043.046.032.642,-** dari pagu sebesar **Rp 1.057.850.961.000,-**, dengan rata rata capaian sebesar 98%. Secara rinci realisasi anggaran satker Kantor Pusat Badan PPSDMP Tahun 2020 dapat ditampilkan pada Tabel 3 dan Grafik 4.

Tabel 3.
Realisasi Anggaran Berdasarkan Kinerja Utama Tahun 2020

NO	KINERJA	PAGU (Rp)	REALISASI	%
1	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	181.702.742.000	179.663.426.332	98,88
2	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	489.612.214.000	482.031.118.574	98,45
3	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	64.674.882.000	63.845.945.363	98,72
4	Pendidikan Pertanian	321.861.123.000	317.600.176.273	98,68
TOTAL		1.057.850.961.000	1.043.046.032.642	98,61



Grafik 4. Realisasi Anggaran Berdasarkan Kinerja Utama Tahun 2020

Anggaran berdasarkan kinerja utama, dijabarkan secara detil dalam anggaran kegiatan. Secara rinci anggaran berdasarkan kegiatan Badan PPSDMP tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4.
Alokasi dan Realisasi Anggaran
Badan PPSDMP Berdasarkan Kegiatan Tahun 2020

PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT	SATUAN	PAGU	REALISASI	%
PROGRAM PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PELATIHAN PERTANIAN					
Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan pelatihan mendukung Program Prioritas Pembangunan Pertanian	Orang	26.391.535.000	26.271.159.605	99,54
	Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian	Orang	1.376.617.000	1.376.605.508	100,00
	Penumbuhan dan Penguatan P4S	Unit	1.945.326.000	1.944.903.433	99,98
	Tenaga Kediklatan Pertanian yang meningkat kompetensinya	Orang	857.881.000	852.325.200	99,35
	Pemberdayaan Masyarakat melalui Program READSI untuk Peningkatan Kapasitas Petani	Kelompok Tani	20.000.000.000	19.242.262.612	96,21
	Peraturan/Norma/Pedoman Pelatihan Pertanian	Satker	9.910.436.000	9.876.632.198	99,66
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	14.176.853.000	14.145.860.505	99,78
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	12.150.816.000	11.981.954.765	98,61
	Layanan Perkantoran	Layanan	94.893.278.000	93.877.088.606	98,93
	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian Total			181.702.742.000	179.568.792.432
Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	Kinerja Penyuluh yang ditingkatkan	Orang	394.584.848.000	390.855.117.544	99,05
	Kelembagaan Penyuluhan pertanian yang melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan petani	Unit	51.450.000	51.450.000	100,00
	Kelembagaan Petani yang dikembangkan	Unit	284.575.000	250.975.000	88,19
	Peraturan/Norma/ Pedoman Kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	Layanan	22.638.690.000	22.205.881.387	98,09
	Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) untuk peningkatan kapasitas petani	Petani	8.493.780.000	8.122.393.346	95,63
	Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terpadu (IPDMIP) untuk Peningkatan Kapasitas Petani	Petani	41.990.000.000	39.575.795.114	94,25
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	21.568.871.000	20.969.506.183	97,22
	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Total			489.612.214.000	482.031.118.574
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP Total	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	26.438.913.000	26.122.398.565	98,80
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	11.150.857.000	10.959.549.500	98,28
	Layanan Perkantoran	Layanan	27.085.112.000	26.763.997.298	98,81
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP Total			64.674.882.000	63.845.945.363	98,72

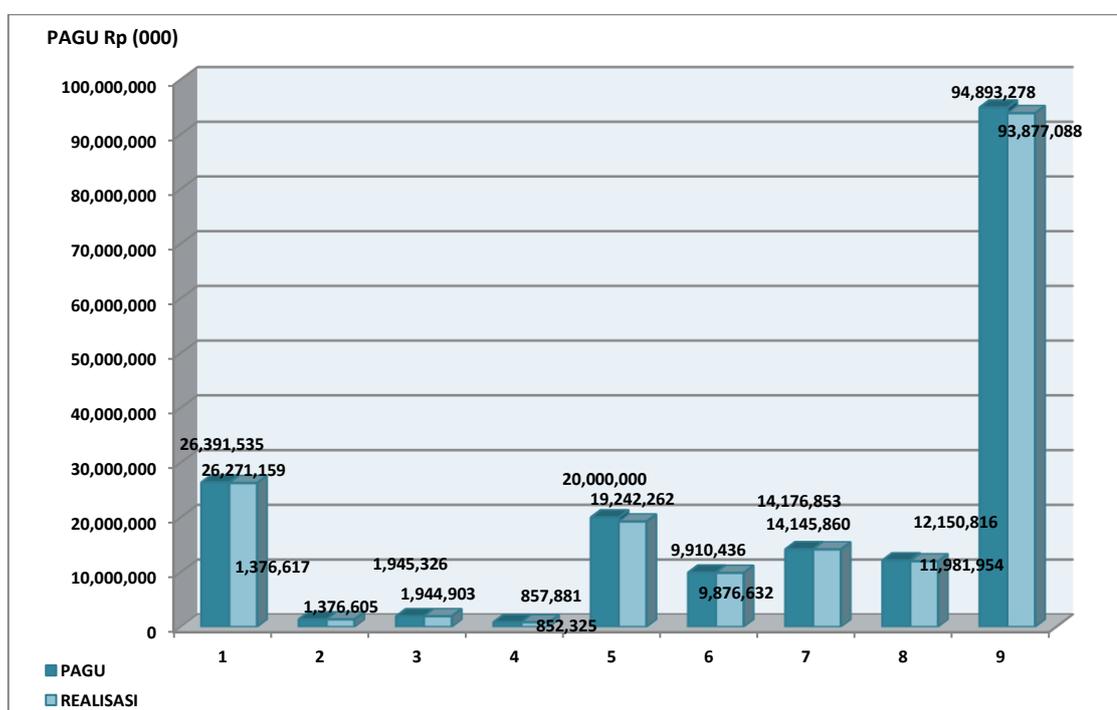
PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT	SATUAN	PAGU	REALISASI	%	
PROGRAM PENDIDIKAN PERTANIAN						
Pendidikan Pertanian	Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi pada Politeknik Pembangunan Pertanian	Orang	76.597.916.000	75.937.198.804	99,14	
	Fasilitasi Pendidikan Formal S2 dan S3 melalui Tugas Belajar	Orang	15.352.452.000	15.306.151.537	99,70	
	Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	2.735.959.000	2.732.163.846	99,86	
	Pendampingan Kebijakan Strategis Pembangunan Pertanian di Kawasan Pertanian dan Kawasan Perbatasan	Orang	9.324.807.000	8.813.260.720	94,51	
	Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian	Kelompok	7.982.745.000	7.892.971.300	98,88	
	Peningkatan Kualitas Pembelajaran pada SMK-PP	Siswa	9.049.129.000	8.981.316.682	99,25	
	Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian (Teaching Factory, DII)	Satker	43.732.905.000	43.636.383.602	99,78	
	Layanan Dukungan Manajemen Pendidikan	Layanan	14.439.216.000	14.282.985.472	98,92	
	Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (YESS) untuk Peningkatan Kapasitas Petani	Layanan	33.796.032.000	32.863.855.557	97,24	
	Lulusan Politeknik Pembangunan Pertanian yang Mengikuti Permagangan (Retooling)	Orang	1.215.070.000	1.213.170.087	99,84	
	Layanan Perkantoran	Layanan	107.634.892.000	105.940.718.666	98,43	
	Pendidikan Menengah Pertanian Total			321.861.123.000	317.600.176.273	98,68
	TOTAL			1.057.850.961.000	1.043.046.032.642	98,61

1) Realiasi Anggaran Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

Realisasi anggaran Pusat Pelatihan Pertanian tahun 2020 mencapai **Rp179.568.792.432,- (98,83%)** dari pagu sebesar **Rp. 181.702.742.000,-**. Secara umum realisasi anggaran cukup berhasil dengan rata-rata capaian sebesar 99,12%. Realisasi tertinggi ditunjukkan pada kegiatan Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian sebesar 100,00%, sedangkan capaian terendah terdapat pada Layanan Dukungan Manajemen Satker sebesar 98,61%. Secara rinci realisasi anggaran Pusat Pelatihan Pertanian pada tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 5 dan Grafik 5.

Tabel 5.
Capaian Anggaran Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian Tahun 2020

No.	OUTPUT	SATUAN	PAGU	REALISASI	%
1	Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan pelatihan mendukung Program Prioritas Pembangunan Pertanian	Orang	26.391.535.000	26.271.159.605	99,54
2	Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian	Orang	1.376.617.000	1.376.605.508	100,00
3	Penumbuhan dan Penguatan P4S	Unit	1.945.326.000	1.944.903.433	99,98
4	Tenaga Kediklatan Pertanian yang meningkat kompetensinya	Orang	857.881.000	852.325.200	99,35
5	Pemberdayaan Masyarakat melalui Program READSI untuk Peningkatan Kapasitas Petani	Kelompok Tani	20.000.000.000	19.242.262.612	96,21
6	Peraturan/Norma/Pedoman Pelatihan Pertanian	Satker	9.910.436.000	9.876.632.198	99,66
7	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	14.176.853.000	14.145.860.505	99,78
8	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	12.150.816.000	11.981.954.765	98,61
9	Layanan Perkantoran	Layanan	94.893.278.000	93.877.088.606	98,93
TOTAL			181.702.742.000	179.568.792.432	98,83



Grafik 5. Capaian Anggaran Pemantapan Sistem Pelatihan Tahun 2020

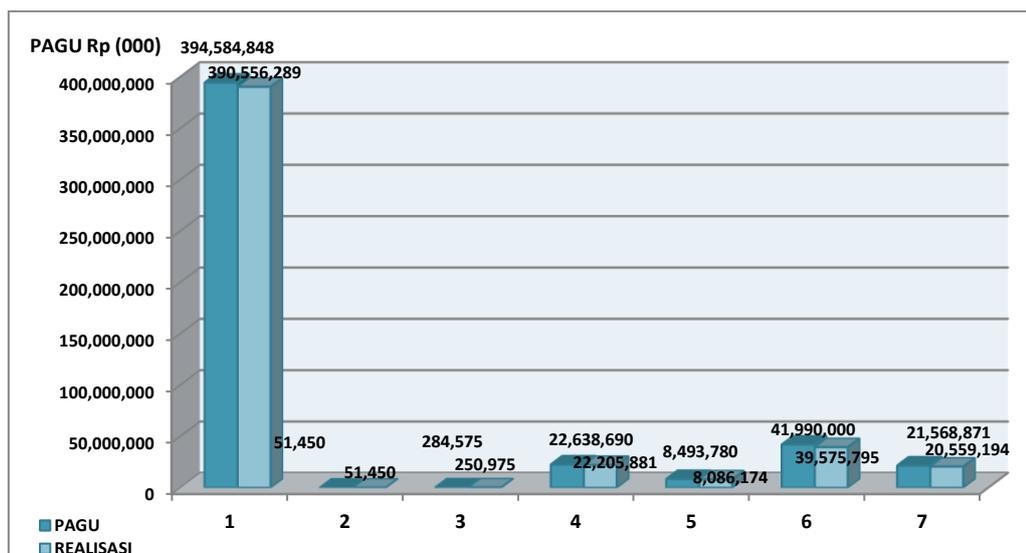
2) Capaian Anggaran Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian

Capaian anggaran pada Pusat Penyuluhan Pertanian tahun 2020 mencapai **Rp. 481.285.760.119,-** atau sebesar **98,30%** dari pagu sebesar **Rp. 489.612.214.000,-**. Capaian tertinggi terdapat pada Kelembagaan Penyuluhan Pertanian yang melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan petani sebesar 100,00%, sedangkan capaian terendah sebesar 88,18% terdapat pada Kelembagaan Petani yang dikembangkan.

Rendahnya realisasi anggaran pada kegiatan Kelembagaan Petani yang dikembangkan terkendala dengan adanya kondisi pandemi Covid 19 sehingga kegiatan dilakukan secara virtual melalui telepon/whatsapp. Namun demikian, secara fisik kegiatan tersebut tetap dilakukan secara optimal, sehingga terdapat efisiensi anggaran.

Tabel. 6
Capaian Anggaran Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian
Tahun 2020

No.	OUTPUT	SATUAN	PAGU	REALISASI	%
1	Kinerja Penyuluh yang ditingkatkan	Orang	394.584.848.000	390.855.117.544	99,05
2	Kelembagaan Penyuluhan pertanian yang melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan petani	Unit	51.450.000	51.450.000	100,00
3	Kelembagaan Petani yang dikembangkan	Unit	284.575.000	250.975.000	88,19
4	Peraturan/Norma/ Pedoman Kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	Layanan	22.638.690.000	22.205.881.387	98,09
5	Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) untuk peningkatan kapasitas petani	Petani	8.493.780.000	8.122.393.346	95,63
6	Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terpadu (IPDMIP) untuk Peningkatan Kapasitas Petani	Petani	41.990.000.000	39.575.795.114	94,25
7	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	21.568.871.000	20.969.506.183	97,22
TOTAL			489.612.214.000	482.031.118.574	98,45



Grafik 6. Capaian Anggaran Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Tahun 2020

3) Capaian Anggaran Program Pendidikan Pertanian

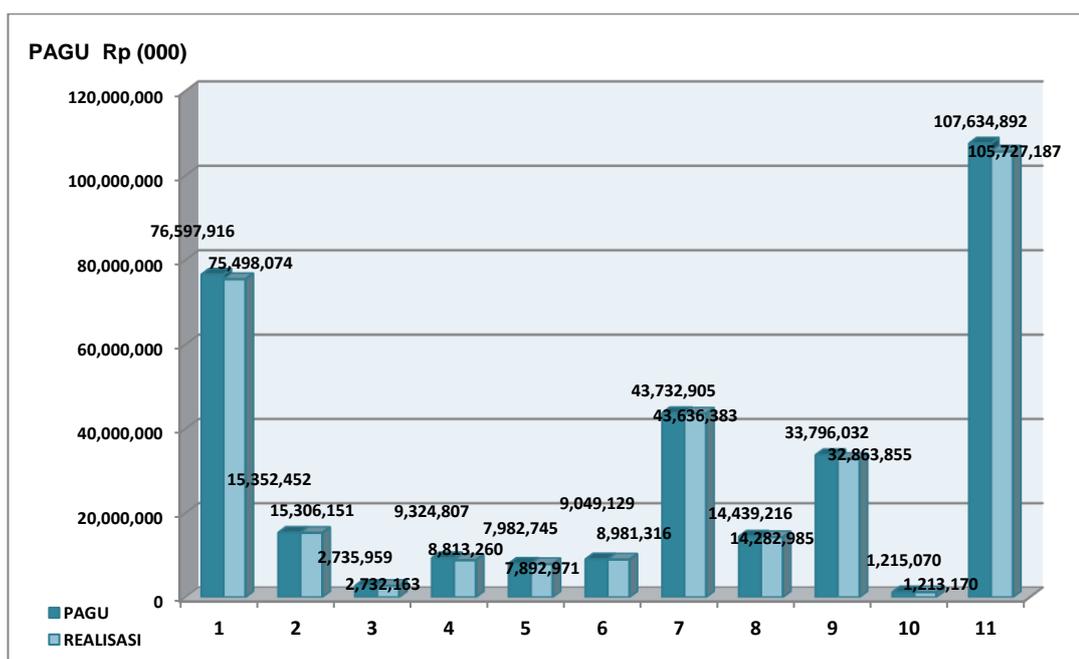
Capaian anggaran pada Program Pendidikan Pertanian tahun 2020 mencapai **Rp. 317.600.176.273,-** atau sebesar **98,68%** dari pagu sebesar **Rp. 321.861.123.000,-** dengan rata rata realisasi 98,68%. Capaian tertinggi terdapat pada Lulusan Politeknik Pembangunan Pertanian yang Mengikuti Permagangan (*Retooling*) sebesar 99,84%, sedangkan Capaian terendah terdapat pada Pendampingan Kebijakan Strategis Pembangunan Pertanian di Kawasan Pertanian dan Kawasan Perbatasan sebesar 94,51%.

Secara rinci realiasi anggaran Pusat Pendidikan Pertanian pada tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 7 dan Grafik 7.

**Tabel 7.
Capaian Anggaran Program Pendidikan Pertanian Tahun 2020**

NO.	OUTPUT	SATUAN	PAGU	REALISASI	%
1	Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi pada Politeknik Pembangunan Pertanian	Orang	76.597.916.000	75.937.198.804	99,14
2	Fasilitasi Pendidikan Formal S2 dan S3 melalui Tugas Belajar	Orang	15.352.452.000	15.306.151.537	99,70
3	Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	2.735.959.000	2.732.163.846	99,86
4	Pendampingan Kebijakan Strategis Pembangunan Pertanian di Kawasan Pertanian dan Kawasan Perbatasan	Orang	9.324.807.000	8.813.260.720	94,51

NO.	OUTPUT	SATUAN	PAGU	REALISASI	%
5	Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian	Kelompok	7.982.745.000	7.892.971.300	98,88
6	Peningkatan Kualitas Pembelajaran pada SMK-PP	Siswa	9.049.129.000	8.981.316.682	99,25
7	Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian (Teaching Factory, DII)	Satker	43.732.905.000	43.636.383.602	99,78
8	Layanan Dukungan Manajemen Pendidikan Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (YESS)	Layanan	14.439.216.000	14.282.985.472	98,92
9	Layanan Dukungan Manajemen Pendidikan Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (YESS) untuk Peningkatan Kapasitas Petani	Layanan	33.796.032.000	32.863.855.557	97,24
10	Lulusan Politeknik Pembangunan Pertanian yang Mengikuti Permagangan (Retooling)	Orang	1.215.070.000	1.213.170.087	99,84
11	Layanan Perkantoran	Layanan	107.634.892.000	105.940.718.666	98,43
TOTAL			321.861.123.000	317.600.176.273	98,68



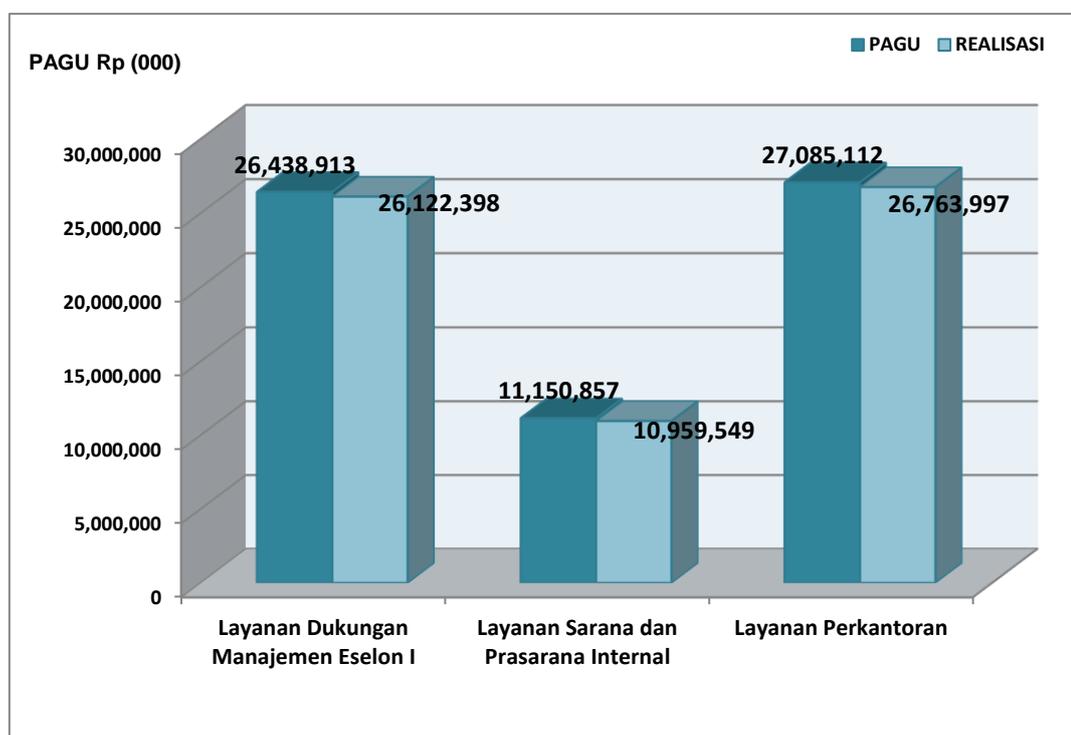
Grafik 7. Capaian Anggaran Program Pendidikan Pertanian Tahun 2020

- 4) **Capaian Anggaran Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya**
 Realisasi anggaran Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2020 berhasil mencapai **Rp. 63.845.945.363,-** atau sebesar **98,72%** dari pagu sebesar **Rp. 64.674.882.000,-** dengan rata rata capaian sebesar 98,83%.

Secara rinci realiasi anggaran Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya tahun 2020 ditampilkan pada Tabel 8 dan Grafik 8.

Tabel. 8
Capaian Anggaran Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2020

NO.	OUTPUT	SATUAN	PAGU	REALISASI	%
1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	26.438.913.000	26.122.398.565	98,80
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	11.150.857.000	10.959.549.500	98,28
3	Layanan Perkantoran	Layanan	27.085.112.000	26.763.997.298	98,81
TOTAL			64.674.882.000	63.845.945.363	98,72



Grafik 8. Capaian Anggaran Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2020

2. Kinerja

Kinerja utama yang dilaksanakan oleh Badan PPSDMP Pusat Tahun 2020, yaitu (a) Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian; (b) Pendidikan Pertanian; (c) Pendidikan Menengah Pertanian; (d) Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian; (e) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan PPSDMP. Masing masing kinerja utama telah ditetapkan target dan sarannya. Rencana kinerja dan sasaran kinerja Badan PPSDMP pada tahun 2020 disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9.
Rencana Kinerja dan Target Sasaran Badan PPSDMP Tahun 2020

PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
PROGRAM PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PELATIHAN PERTANIAN					
Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan pelatihan mendukung Program Prioritas Pembangunan Pertanian	Orang	12.687	12.699	100,09
	Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian	Orang	602	602	100,00
	Penumbuhan dan Penguatan P4S	Unit	155	161	103,87
	Tenaga Kediklatan Pertanian yang meningkat kompetensinya	Orang	196	210	107,14
	Pemberdayaan Masyarakat melalui Program READSI untuk Peningkatan Kapasitas Petani	Kelompok Tani	2.394	2.390	99,83
	Peraturan/Norma/Pedoman Pelatihan Pertanian	Satker	1	1	92,00
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	10	10	98,10
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	10	10	100,90
	Layanan Perkantoran	Layanan	10	10	100,00
Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian Rata-rata					100,22
Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	Kinerja Penyuluh yang ditingkatkan	Orang	38.190	37.800	98,98
	Kelembagaan Penyuluhan pertanian yang melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan petani	Unit	47	47	100,00
	Kelembagaan Petani yang dikembangkan	Unit	34	34	100,00
	Peraturan/Norma/ Pedoman Kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	Layanan	7	7	100,00
	Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) untuk peningkatan kapasitas petani	Petani	6.000	5.121	85,35
	Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terpadu (IPDMIP) untuk Peningkatan Kapasitas Petani	Petani	10.850	10.850	100,00
Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	34	86	252,88	
Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Rata-rata					119,60
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP Rata-rata	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	1	1	100,00
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	100,00
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100,00
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP Rata-rata					100,00
PROGRAM PENDIDIKAN PERTANIAN					
Pendidikan Pertanian	Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi pada Politeknik Pembangunan Pertanian	Orang	5.146	4.682	90,98
	Fasilitasi Pendidikan Formal S2 dan S3 melalui Tugas Belajar	Orang	243	243	100,00
	Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	191	200	104,71

PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
	Pendampingan Kebijakan Strategis Pembangunan Pertanian di Kawasan Pertanian dan Kawasan Perbatasan	Orang	550	550	100,00
	Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian	Kelompok	744	744	100,00
	Peningkatan Kualitas Pembelajaran pada SMK-PP	Siswa	2.977	2.977	100,00
	Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian (Teaching Factory, DII)	Satker	12	12	100,00
	Layanan Dukungan Manajemen Pendidikan	Layanan	6	6	100,00
	Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (YESS) untuk Peningkatan Kapasitas Petani	Layanan	5	5	100,00
	Lulusan Politeknik Pembangunan Pertanian yang Mengikuti Permagangan (Retooling)	Orang	60	60	100,00
	Layanan Perkantoran	Layanan	11	11	100,00
Pendidikan Menengah Pertanian Rata-rata					99,61
RATA-RATA					104,86

1) Capaian Kinerja Pemanfaatan Sistem Pelatihan Pertanian

Capaian kinerja merupakan realisasi fisik dari masing-masing kinerja/output utama Badan PPSDMP selama tahun 2020 dengan cara membandingkan antara output yang dicapai dengan rencana atau target yang telah ditetapkan, antara lain:

a. Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan Pelatihan Mendukung Program Prioritas Pembangunan Pertanian

Pengembangan kurikulum vokasi diselaraskan dengan standar kompetensi kerja. Permintaan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), diukur melalui tiga kriteria utama, yaitu: permintaan pasar tenaga kerja (demand-driven); keterhubungan antara pemberi kerja (industri) dengan lembaga pendidikan vokasi (link); dan kecocokan antara lulusan vokasi dengan pemberi kerja/industri (match). Tingkat keberhasilan pelatihan vokasi diukur dari peningkatan hasil kerja dan keterserapan lulusan vokasi sesuai kompetensi dan bidang keahliannya.

Pelatihan vokasi yang telah dilaksanakan di UPT Pelatihan Pertanian Pusat, yaitu Pelatihan Vokasi Juru Sembelih Halal, Pelatihan Vokasi Mutu dan Keamanan Pangan, Pelatihan Vokasi Operator Perunggasan, Pelatihan Vokasi Pengolahan Daging, Pelatihan Vokasi Pengolahan Susu, Pelatihan Vokasi Reproduksi bagi Petugas ATR, Pelatihan Vokasi Supervisor Perunggasan, Pelatihan Vokasi Alsintan (Job Seeker), Pelatihan Vokasi Pengolahan Hasil Pertanian (Job Seeker), Pelatihan Vokasi Operator Alsintan Pra Panen, Pelatihan Vokasi Manajemen

Agribisnis bagi Asisten Manajer Pemasaran Pertanian, Pelatihan Vokasi Pengolahan Hasil Kedelai, Pelatihan Vokasi Hidroponik bagi Pelaksana, Pelatihan Vokasi, dan Pelatihan Vokasi Operator Ayam Petelur.

Peserta Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan Pelatihan Mendukung Program Prioritas Pembangunan Pertanian yang telah dilatih selama tahun 2020 sebanyak 12.699 orang peserta yang terdiri dari petani/peternak, ASN, wiraswasta (wirausaha, pengusaha, UMKM), IRT, buruh harian lepas, mahasiswa/pelajar dan pensiunan.



Gambar 1. Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi saat Pertemuan Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan Semester I Tahun 2020, di Horison Ultima Bhuvana-Ciawi Bogor, (29/6) yang diikuti 10 kepala UPT Pusat Pelatihan Pertanian lingkup BPPSDMP



Gambar 2. Kementan meningkatkan kualitas vokasi pertanian melalui pembangunan Smart Green House di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor Tahun 2020



Gambar 3. Badan PPSDMP Pertanian Cetak Pengusaha Pertanian Milenial Garut. 18 Januari 2020 melalui Pelatihan Vokasi

b. Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian

Sertifikasi kompetensi sektor pertanian adalah proses pemberian sertifikat kompetensi sektor pertanian yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi dengan mengacu kepada standar kompetensi kerja. Sertifikasi Kompetensi bertujuan untuk menentukan kelayakan SDM Pertanian untuk memperoleh sertifikat kompetensi, memberikan pengakuan terhadap profesi SDM Pertanian, dan meningkatkan kualitas pekerjaan SDM Pertanian.

Dalam pelaksanaan sertifikasi/uji kompetensi diperlukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan sertifikasi sampai dengan penerbitan sertifikat dan pemeliharaan sertifikatnya. LSP juga bertugas dalam penyediaan sarana prasarana sertifikasi, perangkat sertifikasi SDM yang kompeten dalam pelaksanaan sertifikasi, dan asesor kompetensi. LSP Pertanian, Kementerian Pertanian berkedudukan di Pusat Pelatihan Pertanian sehingga Kepala Pusat Pelatihan Pertanian juga sebagai Kepala LSP Pertanian, Kementerian Pertanian. LSP Pertanian Kementerian Pertanian saat ini memiliki 119 jenis skema sertifikasi pada berbagai bidang sektor pertanian, 252 orang Asesor Kompetensi dan 43 Tempat Uji Kompetensi (TUK) UPT Badan PPSDMP dan TUK Jejaringnya (Perguruan Tinggi dan P4S).

Peserta sertifikasi adalah SDM yang mempunyai profesi tertentu, telah menempuh pendidikan atau seseorang yang telah mengikuti pelatihan atau seseorang yang telah berpengalaman dalam bidangnya dan mendaftarkan diri untuk mengikuti assesmen dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam skema sertifikasi. Asesor

kompetensi adalah seseorang yang mempunyai kompetensi di bidang profesi tertentu dan mendapat penugasan dari LSP untuk melaksanakan penilaian secara profesional pada peserta sertifikasi.

Sertifikat Kompetensi dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pertanian, sedangkan masa berlaku Sertifikat Kompetensi selama 3 tahun dan dapat diperpanjang 6 bulan sebelum masa berlaku habis melalui proses pemeliharaan sertifikat/ survailen;

Asesor Kompetensi merupakan seseorang yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melakukan uji kompetensi pada jenis dan kualifikasi profesi tertentu dan mendapat lisensi dari BNSP untuk dapat melaksanakan uji kompetensi.

Tahun 2020 BBPPSDM Pertanian/LSP Pertanian Kementan telah menerbitkan Sertifikat Kompetensi sebanyak 6.056 lembar yang secara rinci ditampilkan pada Tabel 10.

Tabel 10. Sertifikasi Kompetensi lingkup BPPSDMP tahun 2020

No	Kompetensi	Waktu	Jumlah	Penerima Manfaat
1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan	Desember 2020	13	Petugas POPT
2	Penyuluhan Pertanian	Februari, Maret dan November 2020	5054	Petugas Penyuluh Pertanian
3	Fasilitator Organik Tanaman	Februari dan Maret 2020	231	Mahasiswa Polbangtan
4	Penanam Tanaman Hidroponik	Maret 2020	30	Masyarakat
5	Juru Sembelih Halal	Maret, Oktober, November dan Desember 2020	93	Petugas Juleha
6	Pemeriksa Kebuntingan	Maret 2020	61	Petugas Pemeriksa Kebuntingan
7	Inseminator	Februarui, Maret, Agustus, Serptember, November dan Desember 2020	271	Petugas Inseminasi Buatan
8	Operator Alsintan Pra Panen	Februari 2020	61	Petani
9	Operator Alsintan Panen	Maret 2020	60	Petani
10	Paramedik Veteriner Pengendali Penyakit	Februari, Maret, Juni, November	152	Petugas Paramedik Veteriner

No	Kompetensi	Waktu	Jumlah	Penerima Manfaat
		dan Desember 2020		
11	Pengolah Nata de Coco	Februari 2020	10	Ibu-ibu PKK
12	Pengolah Susu Kedelai	Februari 2020	20	Ibu-ibu PKK
TOTAL			6056	



Gambar 4. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Bustanul Arifin Caya dalam sambutannya saat memberikan arahan pada kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Sertifikasi (Sister) Berbasis Online di Serpong, Banten Jumat, 14 Februari 2020.



Gambar 5. Sosialisasi Pengembangan dan Penyusunan Perangkat Sertifikasi Profesi Sektor Pertanian di Serpong, Banten, 28 April 2020 yang dihadiri 50 asesor sektor pertanian.

c. Penumbuhan dan Penguatan P4S

Pusat pelatihan pertanian dan perdesaan swadaya (P4S) merupakan salah satu kelembagaan pelatihan/ permagangan petani yang tumbuh dan berkembang dari petani oleh petani dan untuk petani yang secara langsung berperan aktif dalam pembangunan pertanian di wilayahnya. Dalam rangka meningkatkan peran dan kapasitas P4S sebagai pusat pembelajaran tani melalui kegiatan pelatihan/permagangan yang memenuhi standar/kaidah kaidah proses belajar mengajar, Pusat Pelatihan Pertanian dan UPT Pelatihan Pertanian melaksanakan pembinaan dan bimbingan bagi pengelola P4S. Bimbingan ini mencakup aspek kelembagaan, sarana prasarana, ketenagaan, penyelenggaraan pelatihan/permagangan, pengembangan usaha agribisnis dan jejaring kerja. Output dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya penumbuhan dan penguatan 155 P4S yang tersebar di 15 Provinsi 39 kabupaten, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 11.

Tabel 11. Penumbuhan dan Penguatan P4S Tahun 2020

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Nama P4S	UPT Binaan
1.	Banten	Serang	Mekar Bakti 1	BBPKH Cinagara
		Pandeglang	Sukalimas Mukti	BBPKH Cinagara
2.	DI. Yogyakarta	Gunung Kidul	Ngudi Raharjo 2	BBPKH Cinagara
			Lestari Mulyo	BBPKH Cinagara
3.	Jawa Barat	Kota Sukabumi	Tani Mandiri	BBPP Lembang
		Purwakarta	Agri Jaya Bakti	BBPP Lembang
		EITATSU	BBPP Lembang	
		Maju Tani	BBPP Lembang	
	Subang	Barokah Agro Lestari	BBPP Lembang	
		AIFIBER	BBPP Lembang	
		Brahman Sejahtera	BBPP Lembang	
	Sumedang	Waidafarm	BBPP Lembang	
	Pangandaran	Langkap Lancar Okiagaru	BBPP Lembang	
	Tasikmalaya	Kaputuihan	BBPP Lembang	
	Cianjur	Zero Farm Technology	BBPP Lembang	
	Mitra Kabisa	BBPP Lembang		
Garut	Mamaja Tani	BBPP Lembang		

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Nama P4S	UPT Binaan
		Ciamis	Cahaya Okiagaru	BBPP Lembang
		Kota Tasikmalaya	Pandan Wangi	BBPP Lembang
			Bakti Hurip	BBPP Lembang
			Mukti Karya	BBPP Lembang
		Cirebon	Rumah Belajar Kreasikus	BBPP Lembang
		Bogor	Komunitas Tumbuh Bersama	BBPP Lembang
			Griya Seruni	BBPP Lembang
			Satya Mandiri	BBPP Lembang
			Barokah Ikamaja	BBPP Lembang
			Swen Inovasi Mandiri (SIM)	BBPP Lembang
		Kota Bekasi	Ibu Farm	BBPP Lembang
		Sukabumi	Nagrak Organik Sri Center (NOSC)	BBPP Lembang
		Bandung Barat	Tatani Lembang	BBPP Lembang
4.	Jawa Timur	Probolinggo	Yoganik	BBPP Ketindan
		Situbondo	Kebun Mandiri	BBPP Ketindan
		Kota Malang	Bumi Malang Lestari	BBPP Ketindan
5.	Sulawesi Selatan	Sidrap	Semangat Millenial	BBPP Batangkaluku
		Bone	P4S Agro Satwa Lampoko	BBPP Batangkaluku
		Enrekang	Laskar Pelangi	BBPP Batangkaluku
		Maros	Marannu	BBPP Batangkaluku
6.	Sulawesi Tengah	Sigi	Hipetanik Unggul Sejati	BBPP Batangkaluku
7.	Sulawesi Tenggara	Konawe	Tataman Ikamaja	BBPP Batangkaluku
8.	Sulawesi Barat	Polman	Kontara Garden	BBPP Batangkaluku
9.	Sulawesi Utara	Minahasa Utara	Sahabat Alam	BBPP Batangkaluku

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Nama P4S	UPT Binaan
10.	Nusa Tenggara Timur	Kupang	GS. Organik	BBPP Kupang
11.	Sumatera Utara	Deliserdang	Kualanamu	BPP Jambi
12.	Sumatera Barat	Solok Selatan	Laskar Andalas	BPP Jambi
13.	Jambi	Bungo	Sempulur Tani	BPP Jambi
		Merangin	Karya Tani	BPP Jambi
		Tebo	Albadsiah	BPP Jambi
			Rimbo Pulai	BPP Jambi
14.	Sumatera Selatan	Ogan Ilir	Lestari Tani	BPP Jambi
		OKU Timur	Golden Farm	BPP Jambi
15.	Lampung	Lampung Tengah	Saung Bambu	BPP Jambi
		Kota Metro	Telaga Rizqi 1	BPP Jambi
			Margo Makmur	BPP Jambi



Gambar 6. Melalui P4S, BPPSDMP Kementan Cetak SDM Pertanian Unggul Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, Dedi Nursyamsi di sela launching Eduwisata Green House di Polbangtan Bogor, Senin 14 Desember 2020.



Gambar 7. Pembukaan jambore Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya atau P4S. Kegiatan yang dilaksanakan tanggal 25 sampai dengan 27 Pebruari 2020, digelar di bale tani, kecamatan Bareng, kabupaten Jombang dengan diikuti 148 peserta.

d. Tenaga Kediklatan Pertanian yang Meningkatkan Kompetensinya

Pelatihan memiliki peran strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan non apartur yang profesional baik keterampilan, sikap dan perilaku sesuai dengan tugas dan peranannya masing-masing. Salah satu dukungan untuk meningkatkan peran penyelenggaraan pelatihan adalah dukungan widyaiswara dan tenaga pelatihan lainnya yang kompeten sehingga mampu menyelenggarakan pelatihan dengan baik.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga kediklatan (Widyaiswara dan tenaga kediklatan lainnya) lingkup Pusat Pelatihan Pertanian dan UPT Pelatihan Pertanian, tahun 2020 telah dilaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kediklatan melalui kegiatan pelatihan, workshop, dan lain-lain dalam rangka pengembangan kapasitas individu, tim/kelompok dan pengembangan organisasi melalui proses pembelajaran secara terus menerus. Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya kompetensi sebanyak 258 orang tenaga kediklatan sebagaimana ditampilkan pada Tabel 12.

Tabel 12. Peserta Diklat yang Meningkatkan Kompetensinya Tahun 2020

No.	Nama Kegiatan	Asal Peserta	Jumlah Peserta (orang)
1.	Pelatihan Substantif Angkatan 6	UPT Pelatihan dan P4S	12
2.	Pelatihan Substantif Angkatan 7	UPT Pelatihan dan P4S	11
3.	Pelatihan Substantif Angkatan 8	UPT Pelatihan dan P4S	12
4.	Pelatihan Substantif Bidang Pertanian di P4S Griya Seruni, Ciawi	Puslatan dan P4S	25
5.	Pelatihan Substantif Bidang Pertanian di P4S SWEN Inovasi Mandiri, Bogor	Puslatan dan P4S	25
6.	Pelatihan Substantif Bidang Pertanian di P4S Raih Persada, Tangerang Selatan	Puslatan dan P4S	29
7.	Pelatihan Substantif Bidang Pertanian di P4S Raih Persada, Tangerang Selatan	Puslatan dan P4S	29
8.	Pertemuan Pengembangan Profesionalisme Ketenagaan Pelatihan Pertanian Mendukung Konstratani di Serpong, Banten	Puslatan, UPT Pelatihan dan Sekretariat BPPSDMP	60
9.	Pertemuan Peningkatan Kapasitas Ketenagaan Pelatihan Pertanian di Anyer, Banten	Puslatan, Sekretariat BPPSDMP dan P4S	80
TOTAL			258

Kegiatan dilaksanakan di:

- Pelatihan Substantif Bidang Alat Mesin Excavator dilaksanakan pada tanggal 27 Januari – 1 Februari 2020 di Technical Training Departement PT. United Tractors Tbk (PSTTD) Jl. Raya Bekasi No.Km. 22, RT.8/RW.4, Rw. Terate, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13910.
- Pelatihan Substantif Bidang Alat Mesin Excavator dilaksanakan pada tanggal 9 – 15 Februari 2020 di Technical Training Departement PT. United Tractors Tbk (PSTTD) Jl. Raya Bekasi No.Km. 22, RT.8/RW.4, Rw. Terate, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13910.
- Pelatihan Substantif Bidang Alat Mesin Excavator dilaksanakan pada tanggal 24 – 29 Februari 2020 di Technical Training Departement PT.

United Tractors Tbk (PSTTD) Jl. Raya Bekasi No.Km. 22, RT.8/RW.4, Rw. Terate, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13910.

- Pelatihan Substantif Bidang Pertanian dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2020 di P4S Griya Seruni Jl. Ciaul, Bojong Murni, Kec. Ciawi, Bogor, Jawa Barat 16720.
- Pelatihan Substantif Bidang Pertanian dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020 di P4S SWEN Inovasi Mandiri Jl. Cikoneng II No.26, RT.5/RW.3, Pagelaran, Ciomas, Bogor, Jawa Barat 16610.
- Pelatihan Substantif Bidang Pertanian dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2020 di P4S Raih Persada Jalan Dewi Sartika, RT.1/RW.3, Cipayung, Kota Tangerang Selatan, Banten.
- Pelatihan Substantif Bidang Pertanian dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2020 di P4S Griya Seruni Jl. Ciaul, Bojong Murni, Kec. Ciawi, Bogor, Jawa Barat 16720.
- Pertemuan Pengembangan Profesionalisme Ketenagaan Pelatihan Pertanian Mendukung Konstratani dilaksanakan pada tanggal 13 – 14 Januari 2020 di Hotel Santika Teraskota, Jl. Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15311. Peserta Pengembangan Profesionalisme Ketenagaan Pelatihan Pertanian Mendukung Konstratani lingkup UPT Pelatihan Pertanian dan Pusat Pelatihan Pertanian.

Pertemuan Peningkatan Kapasitas Ketenagaan Pelatihan Pertanian dilaksanakan pada tanggal 28 – 29 Februari 2020 di Hotel Marbella Hotel, Convention & Spa Anyer Jl. Raya Karang Bolong No.KM, Bandulu, Kec. Anyar, Serang, Banten 42466. Peserta Peningkatan Kapasitas Ketenagaan Pelatihan Pertanian lingkup Pusat Pelatihan Pertanian dan P4S.



Gambar 8. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVII Tahun 2020. Diikuti 60 peserta lintas instansi kegiatan dibuka ,Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), di Ciawi Bogor Jawa Barat.

e. Pemberdayaan Masyarakat melalui Program READSI untuk Peningkatan Kapasitas Petani

Proyek Rural Empowerment and Agricultural Development Scalling-up Initiative (READ-SI) merupakan inisiasi peningkatan skala atas proyek Rural Empowerment and Agricultural Development (READ). READ telah dilaksanakan BPPSDMP tahun 2008 - 2014 pada 5 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah melalui pendanaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Pemerintah Indonesia dari International Fund for Agricultural Development (IFAD) dan telah dinilai berhasil oleh Bappenas. Untuk menjaga keberlanjutan kegiatan READ pada tahun 2015-2017 dilakukan kegiatan Replikasi READ di 2 Provinsi yaitu Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur di 4 (empat) kabupaten. Proyek READ secara signifikan berhasil memberdayakan petani kecil, meningkatkan pendapatan dan produksi serta memperkuat kelembagaan tingkat desa melalui satupaket lengkap program pemberdayaan yang terintegrasi.

Tujuan program READSI adalah pemberdayaan rumah tangga di pedesaan pada lokasi proyek baik secara individu maupun secara kelompok dengan keterampilan membangun rasa percaya diri dan memanfaatkan sumberdaya untuk mendapatkan pendapatan dari sektor pertanian dan non pertanian serta meningkatkan taraf hidupnya dengan secara berkelanjutan.

Lokasi Proyek READ-SI mencakup 342 desa di 14 kabupaten di Pulau Sulawesi (Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara) dan masing-masing 2 kabupaten di Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur. Khusus untuk di Sulawesi Tengah, READ-SI

akan berada di 5 (lima) kabupaten lokasi Proyek READ, demikian juga di Kalimantan Barat dan NTT akan berada di lokasi Proyek Replikasi READ. Secara total proyek READ-SI akan melibatkan 18 kabupaten yang terdiri dari 9 kabupaten lama (ex proyek READ dan program Replikasi READ) dan 9 kabupaten baru. Target pemberdayaan melalui program READSI adalah 2.394 kelompok tani.

Kelompok Tani yang terbentuk dalam Program READSI yaitu 2366 Kelompok tani sedangkan rumah tangga petani yang dilibatkan dalam Program READSI yang yaitu sejumlah 55.039 yang tersebar di 6 Provinsi dan 18 Kabupaten. Keterlibatan rumah tangga tersebut meliputi kegiatan Sekolah Lapang sebanyak 19.842 dan penyaluran bantuan saprodi sebanyak 28.925 orang di Tahun 2020



Gambar 9. Pertemuan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Program READSI Tahun 2020. tanggal 15 sampai dengan 17 Agustus 2019 di Hotel The Royal Surakarta Heritage Solo Jawa Tengah.



Gambar 10. Pada Tanggal 4 Maret 2020 DPRD Kolaka Utara Siap Dukung Kostratani dan READSI

f. Peraturan/Norma/Pedoman Pelatihan Pertanian.

Peraturan/norma/pedoman pelatihan pertanian merupakan kegiatan/penyusunan dokumen pendukung terlaksananya kegiatan yang berkaitan dengan layanan Program dan Kerjasama Pelatihan, Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Ketenagaan, layanan Standardisasi dan Sertifikasi Profesi, layanan Keuangan, Perlengkapan dan Kepegawaian.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas kegiatan sesuai dengan tupoksi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan, mempermudah dalam mengoperasionalkan kegiatan yang sedang berjalan, meningkatkan efisiensi, efektifitas dan kuantabilitas dalam pelaksanaan kegiatan.

Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya Peraturan/norma/pedoman pelatihan pertanian di Pusat Pelatihan Pertanian. Peraturan/norma/pedoman pelatihan pertanian yang sudah disusun di Pusat Pelatihan Pertanian yakni:

1. Juknis Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian
2. Rencana Strategi Tahun 2020-2024
3. Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian Melalui E-Learning

Adapun peraturan/norma/pedoman pelatihan pertanian tahun 2020 yang masih dalam proses antara lain:

- a. KKNi Bidang Tanaman Buah
- b. KKNi Bidang Tanaman Sayuran
- c. KKNi Bidang Florikultura
- d. KKNi Bidang Tanaman Obat Rimpang

g. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Perkembangan teknologi informasi saat ini sudah tidak terbendung lagi keberadaan strategisnya. Bahkan salah satu ciri kemajuan hari ini salah satu indikatornya adalah pemanfaatan IT, termasuk juga pada industri 4,0 komponen utamanya adalah IT.

Lembaga-lembaga pengembangan SDM seharusnya selangkah lebih maju dalam pemanfaatan IT. Sebab SDM adalah kunci kemajuan suatu Lembaga dan usaha. Dalam konteks pelatihan pertanian, dibutuhkan dukungan kegiatan yang terencana dan terukur ketika hendak menjadikan suatu Lembaga yang berkualitas dan akuntabel.

Pelatihan yang berkualitas baik penyelenggara, sistem, dan hasilnya, selayaknya mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Selain itu, dibutuhkan kenyamanan dalam berlatih. Sarana dan Prasarana pelatihan yang memadai adalah kuncinya.

Guna mendukung hal tersebut, tahun 2020 diadakan layanan sarana dan prasana antara lain: pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, peralatan fasilitas perkantoran, pembangunan/renovasi gedung/bangunan, dan kendaraan operasional. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana prasarana di Pusat dan UPT Pelatihan Pusat, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 13.

Tabel 13. Fasilitas Prasarana dan Sarana Tahun 2020

Satker	Jenis	Jumlah	Satuan
PPMKP Ciawi	PC Komputer	14	Unit
PPMKP Ciawi	Kamera	1	Unit
PPMKP Ciawi	Lighting System Kit	2	Pkt
PPMKP Ciawi	Group Expension microphone	1	Unit
PPMKP Ciawi	Screen	2	Unit
PPMKP Ciawi	Laptop	1	Unit
PPMKP Ciawi	CCTV	1	Pkt
PPMKP Ciawi	TV 32	16	Unit
PPMKP Ciawi	Profesional Recorder	1	Unit
PPMKP Ciawi	Boom Mix	1	Unit
PPMKP Ciawi	Headset Monitor	1	Unit
BBPKH Cinagara	Lcd Proyektor	1	Unit
BBPP Lembang	Laptop	5	Unit
BBPP Lembang	PC Desktop i5	3	Unit
BBPP Lembang	Printer Inkjet	2	Unit
BBPP Lembang	Printer Laser	2	Unit
BBPP Lembang	Scanner	2	Unit
BBPP Lembang	Telepon PABX	1	Unit
BBPP Lembang	Telepon Celular Central	1	Unit
BBPP Lembang	Telepon Celular Admin	2	Unit
BBPP Lembang	Tab Admin	1	Unit
BBPP Lembang	Telepon Celular Operasional	2	Unit
BBPP Lembang	Wireless AP	3	Unit
BBPP Lembang	Wireless Router	4	Unit
BBPP Lembang	Vidio Conferencing System	1	Unit
BBPP Lembang	CCTV16 Channel	1	Unit
BBPP Lembang	Sound System Kelas	2	Unit
BBPP Ketindan	Laptop	9	Unit
BBPP Ketindan	AOR	1	Pkt
BBPP Ketindan	Kamera	1	Unit
BBPP Ketindan	Printer Laser Jet Besar	2	Unit
BBPP Ketindan	Printer Laser Jet Kecil	2	Unit
BBPP Ketindan	Printer Warna	3	Unit

Satker	Jenis	Jumlah	Satuan
BBPP Ketindan	Mic Wireless	4	Unit
BBPP Batu	Drone	2	Unit
BBPP Batu	Personal Komputer	2	Unit
BBPP Batu	Thermo Scan	2	Unit
BBPP Batu	Vidio Conference	1	Unit
BBPP Batu	Standing Bracket TV	2	Unit
BBPP Batu	Laptop	1	Unit
BBPP Batu	Peralatan Shooting E-learning	1	Paket
BBPP Batangkaluku	Soundsystem (speaker aktif)	2	Buah
BBPP Batangkaluku	Printer Epson L3110	1	Buah
BBPP Batangkaluku	Voice Recorder	1	Unit
BBPP Batangkaluku	Dual Microphone	1	Unit
BBPP Batangkaluku	Stabilizer Kamera	1	Unit
BBPP Batangkaluku	Mixer Audio	1	Buah
BBPP Kupang	TV LED 43	1	Unit
BBPP Kupang	Web Camera Confrence	1	Unit
BBPP Kupang	Desktop PC	1	Unit
BPP Jambi	Laptop / Notebook	3	Unit
BPP Jambi	Laptop / Notebook	2	Unit
BPP Jambi	Personal Computer / PC	3	Unit
BPP Jambi	Scanner Otomatis	2	Unit
BPP Jambi	Printer Scanner Copy	2	Unit
BPP Jambi	Proyektor	3	Unit
BPP Jambi	Megaphone	2	Unit
BPP Jambi	Layar TV LED 42	2	Unit
BPP Jambi	Layar TV LED 60	1	Unit
BPP Jambi	Kamera dan Tripod	1	Unit
BPP Jambi	Screen Proyektor 150, 4:3 Motorize	1	Unit
BPP Jambi	MIC dan Amplifier	1	Paket
BPP Jambi	Web camera	2	Unit
BPP Jambi	Microphone Wireless Podium	3	Unit
BPP Jambi	Handy Cam	1	Unit
BPP Jambi	Gimbal/Stabilizer	1	Unit
BPP Jambi	Laptop	2	Unit
BPP Jambi	Webcamera	1	Unit
BPP Jambi	Gadget	1	Unit
BPP Jambi	Lampu Studio (Lighting Studio)	1	Unit
BPP Jambi	Mic Wireless	2	Unit
BPP Lampung	Laptop	2	Unit
BPP Lampung	LCD Proyektor	1	Unit



Gambar 11. Kabupaten Pandeglang provinsi Banten menerima 17 paket information technology (IT) yang disalurkan Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Tahun 2020

h. Layanan Dukungan Manajemen Satker

Layanan dukungan manajemen merupakan kegiatan/ penyusunan dokumen pendukung terlaksananya seluruh kegiatan yang berkaitan dengan administrasi, perkantoran dan pelatihan. Kegiatan ini meliputi kegiatan Perencanaan, Identifikasi Kebutuhan Latihan (IKL), Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi, Pasca Diklat, Kerjasama, Keuangan, Organisasi dan Kepegawaian, serta Evaluasi dan Pelaporan. Dukungan manajemen termasuk dukungan terhadap kegiatan pelaksanaan UPSUS. Dengan adanya dukungan manajemen, operasional kegiatan berjalan efektif, efisien dan akuntabel. Anggaran Layanan dukungan Manajemen teralokasi pada PPMKP Ciawi, BBPKH Cinagara, BBPP Lembang, BBPP Ketindan, BBPP Batu, BBPP Batangkaluku, BBPP Bnuang, BBPP Kupang, BPP Jambi, dan BPP Lampung.

Salah satu kegiatan dukungan manajemen satker adalah Perencanaan Kegiatan dan Anggaran. Dimana output dari kegiatan ini adalah tersusunnya kegiatan dan anggaran Pusat dan UPT Pelatihan Pertanian Pusat yang dilengkapi dengan TOR dan RAB.

i. Layanan Perkantoran

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pelatihan Pertanian BPPSDMP merupakan lembaga pelatihan yang berada di Kementerian Pertanian yang diberi tugas menyediakan Pelatihan di Balai-balai UPT Pelatihan. Didalam penyelenggaraan Pelatihan didukung pegawai, diantaranya adalah widyaiswara sebagai bagian dari tenaga pelatihan, disamping itu didukung pula dengan sarana prasarana yang memadai antara lain

bangunan utama dan penunjang, transportasi (kendaraan), alat komunikasi, alat laboratorium, sarana olah raga, dll.

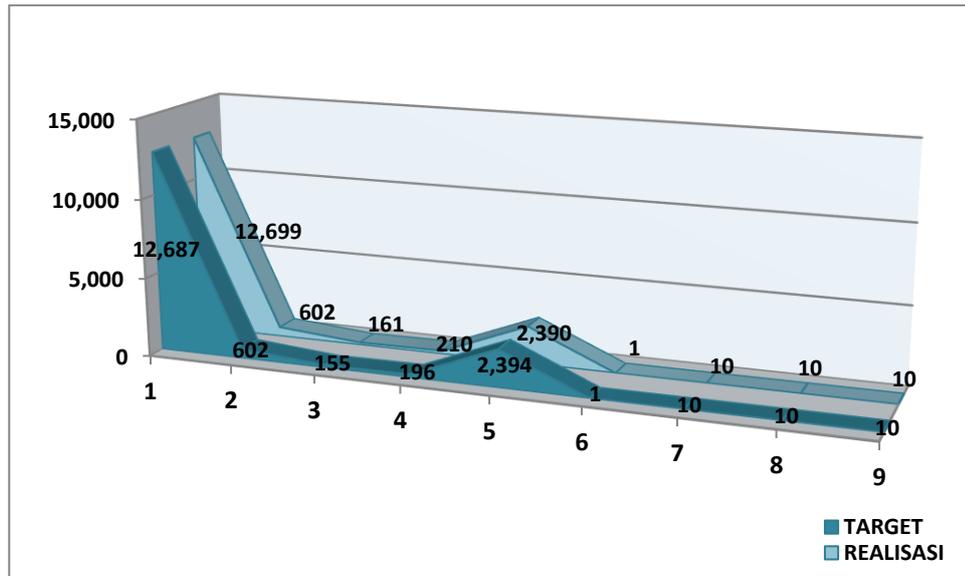
Sarana dan prasarana tersebut diperlukan untuk mendukung tupoksi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pelatihan Pertanian, yaitu menyelenggarakan pelatihan dan pengajaran, penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, menyelenggarakan penelitian, dan menyelenggarakan administrasi perkantoran.

Konsekuensi logis dari tupoksi tersebut, harus tersedia anggaran untuk operasional baik untuk menggaji pegawai, pemeliharaan sarana prasarana, pengadaan peralatan/bahan rutin dan operasional perkantoran lainnya seperti jasa listrik, air, telepon, internet dan lain-lain. Output dari kegiatan ini adalah terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai serta operasional perkantoran di 10 UPT Pelatihan Pusat.

Capaian Kinerja Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian tahun 2020 pada umumnya tercapai dengan rata-rata 103,89%. Secara rinci realiasi kinerja Pusat Pelatihan Pertanian pada tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 14 dan Grafik 9.

Tabel. 14
Realisasi capaian Kinerja Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

No.	OUTPUT	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan pelatihan mendukung Program Prioritas Pembangunan Pertanian	Orang	12.687	12.699	100,09
2	Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian	Orang	602	602	100,00
3	Penumbuhan dan Penguatan P4S	Unit	155	161	103,87
4	Tenaga Kediklatan Pertanian yang meningkat kompetensinya	Orang	196	210	107,14
5	Pemberdayaan Masyarakat melalui Program READSI untuk Peningkatan Kapasitas Petani	Kelompok Tani	2.394	2.390	99,83
6	Peraturan/Norma/Pedoman Pelatihan Pertanian	Satker	1	1	92,00
7	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	10	10	98,10
8	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	10	10	100,90
9	Layanan Perkantoran	Layanan	10	10	100,00



Grafik 9. Realisasi capaian Kinerja Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

2) Capaian Kinerja Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian

Capaian kinerja merupakan realisasi fisik dari masing-masing kinerja/output utama Badan PPSDMP selama tahun 2020 dengan cara membandingkan antara output yang dicapai dengan rencana atau target yang telah ditetapkan, antara lain:

a. Kinerja Penyuluh yang ditingkatkan

Penyebaran dan kompetensi tenaga penyuluh pertanian sebagian besar mendukung subsektor pangan, khususnya padi dengan tidak menghilangkan fungsi mengawal dan mendampingi pencapaian target produksi komoditas utama lainnya. Fasilitasi insentif kinerja penyuluh pertanian dimaksudkan untuk memberikan dukungan bagi penyuluh untuk pendampingan petani dalam menggunakan teknologi pertanian yang direkomendasikan terutama oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Program Pemantapan Sistem Penyuluhan dengan IKSK petani yang menerapkan teknologi didukung oleh kegiatan peningkatan kinerja Penyuluh Pertanian melalui fasilitasi Biaya Operasional Penyuluh (BOP) bagi Penyuluh Pertanian PNS dan THL-TB PP.



Gambar 12. Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian tahun 2020 di Hotel Padjadjaran Bogor 28 – 30 Januari 2020 oleh Kepala BPPSDMP Kementan Prof Dedi Nursyamsi

b. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian yang Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani

Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan yang terdiri dari kelembagaan penyuluhan pemerintah, swasta dan swadaya. Kelembagaan Penyuluhan Pemerintah terdiri atas Badan PPSDMP di Pusat, Dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah provinsi, kabupaten/kota dan Balai Penyuluhan Pertanian di kecamatan.

Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, mencakup Kelompok tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian. Kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya adalah Kelembagaan petani (gapoktan) yang ditumbuhkan dan dikembangkan menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP). Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usahatani yang dibentuk oleh, dari dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Secara umum pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada petani agar berkembang usahatannya, memberdayakan kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) dalam mengembangkan usaha

agribisnisnya dengan berbasis kawasan pertanian, dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani beserta keluarganya serta meningkatkan perekonomian di pedesaan.

Pembentukan KEP dalam bentuk badan hukum atau lainnya seperti koperasi, Kelompok Usaha Bersama (KUB), dll dilakukan melalui transformasi Poktan/Gapoktan, agar kelembagaan tersebut lebih terarah dalam berusahatani berorientasi agribisnis guna peningkatan pendapatan, nilai tambah, dan kesejahteraan petani. Transformasi tersebut dilakukan meliputi aspek manajemen organisasi maupun manajemen usahatani.

Transformasi manajemen organisasi dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani, dari struktur organisasi yang sederhana dan bersifat sosial, dimana hanya terdapat kepengurusan yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota, menjadi struktur organisasi yang lebih berorientasi bisnis komersial, yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan unit-unit usaha serta dewan pengawas.

Sementara transformasi usahatani dilakukan, untuk petani dari berusahatani secara subsisten sekedar pemenuhan kebutuhan menjadi skala ekonomi komersial, mekanik dan mengusahakan pertanian dari hulu hingga hilir. Transformasi kelembagaan petani dijelaskan secara ringkas pada Gambar 13.



Gambar 13. Proses Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)

Tujuan Pembentukan KEP, antara lain :

1. Membentuk organisasi petani berbasis manajemen agribisnis berkarakter perusahaan;
2. Peningkatan skala usahatani, daya saing produk dan menguntungkan;
3. Mendorong para petani untuk berkelompok besar dalam satu manajemen di level Kecamatan;
4. Meningkatkan posisi tawar, pendapatan dan kesejahteraan petani;

5. Mendorong terbentuknya usahatani skala ekonomi;
6. Memberikan nilai tambah kepada petani dan usahatani;
7. Mempermudah akses permodalan, saprodi, dan pemasaran.

Indikator kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya adalah kelembagaan petani (gapoktan) yang menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dengan bentuk koperasi tani atau Badan Usaha Milik Petani (BUMP) lainnya.



Gambar 14. Kepala Pusluhtan, Leli Nuryati Membuka Kegiatan Bimbingan Teknis KEP/Korporasi Petani Bagi Petugas Pendampingan di Lokasi Kostratani serta Konsolidasi Tim Verifikasi dan validasi dan Simluhtan Pusat dan Provinsi, di Hotel NEO Surabaya, 25 – 27 Februari 2020

c. Kelembagaan Petani yang dikembangkan

Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dan Korporasi Petani dimaksudkan untuk memudahkan koordinasi antar anggota dan antar kelompok lain, sehingga mampu memperkuat posisi tawar dalam pasar yang kompetitif. Penumbuhan dan pengembangan KEP baik dalam bentuk koperasi maupun bentuk lainnya, dilakukan melalui transformasi manajemen Poktan/Gapoktan, meliputi aspek manajemen organisasi maupun manajemen usahatani agar kelembagaan petani dapat menjadi korporasi petani yang lebih terarah dalam berusaha tani dengan orientasi agribisnis guna peningkatan pendapatan, nilai tambah dan kesejahteraan petani dengan berbasis kawasan pertanian, sehingga dapat meningkatkan perekonomian pedesaan. Korporasi dapat berbentuk Koperasi, CV, BUMP, dan PT



Gambar 15. Kementan Pada Tanggal 06 April 2020 Jadikan Petani Sumenep sebagai Andalan dan Perkuat Ekonomi Desa.

d. Peraturan/Norma/ Pedoman Kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian

- a) Rancangan Peraturan Presiden tentang Penumbuhan dan Pengembangan Korporasi Petani;
- b) Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyuluhan Pertanian;
- c) Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan /OT.140/3/2011 tentang Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Teladan;
- d) Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan /OT.140/3/2011 tentang Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan;
- e) Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan /OT.140/3/2011 tentang Pedoman Penilaian Gabungan Kelompok Tani Berprestasi;
- f) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan /OT.140/4/2012 tentang Pedoman Penilaian Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Teladan;
- g) Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan /OT.140/4/2012 tentang Pedoman Penilaian Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi;
- h) Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan /OT.140/3/2013 tentang Pedoman Penilaian Petani Berprestasi;
- i) Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/OT.140/4/2013 tentang Pedoman Penilaian Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi;

- j) Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2015 tentang Pedoman Kerjasama Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- k) Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani.

e. Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) untuk peningkatan kapasitas petani

Mendukung modernisasi kelembagaan dan penguatan serta pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia terkait. Kegiatan yang dibiayai di bawah komponen ini meliputi tinjauan kelembagaan, pendirian dan penguatan institusi pengelolaan irigasi (Unit Pengelolaan Irigasi, Komisi Irigasi, Asosiasi Pengguna Air dan federasi mereka), peningkatan kerangka peraturan dan penggabungan dalam pemrograman dan perencanaan (RPJMD) untuk irigasi partisipatif Tingkat kabupaten dan Provinsi. Periode SIMURP dilaksanakan tahun 2019 sampai dengan 2023 di 8 Provinsi.

Pelaksanaan SIMURP merupakan bagian kegiatan utama Pengembangan Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri di BPPSDMP Kementerian Pertanian sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor: 133/KPTS/RC.020/I/05/2020 tentang Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2020 – 2024.

Kegiatan SIMURP NPIU BPPSDMP Kementerian Pertanian fokus terhadap upaya strategi Pemerintah untuk mengantisipasi dampak negatif perubahan ekstrem iklim global melalui pelaksanaan pembangunan Pertanian Cerdas Iklim (PCI)/*Climate Smart Agriculture* (CSA). Dalam pelaksanaan CSA ada tiga hal utama yang menjadi sasaran pencapaian, yakni; (i) Peningkatan Intensitas Pertanaman, produktivitas dan pendapatan sektor pertanian, (ii) Mengadaptasi dan membangun ketangguhan terhadap perubahan iklim, dan (iii) Sedapat mungkin mengurangi dan atau meniadakan emisi Gas Rumah Kaca. Pada dasarnya CSA merupakan pendekatan pada pengembangan strategi pertanian untuk mengamankan ketahanan pangan berkelanjutan dalam menghadapi kondisi perubahan iklim.

Proyek SIMURP bertujuan untuk peningkatan intensitas pertanaman padi melalui pengaturan pola tanam akibat perubahan iklim global atau Pertanian Cerdas Iklim (*Climate Smart Agriculture*: CSA) untuk meningkatkan produktivitas dan produksi tanaman sehingga memberikan

peningkatan pendapatan petani pada lahan sawah beririgasi terpilih menuju ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Sasaran Proyek SIMURP, meliputi:

1. Meningkatnya partisipasi kelembagaan petani dalam penerapan inovasi dan teknologi (adopsi) yang efisien dan efektif serta menerapkan budidaya yang tahan (adaptif) terhadap perubahan iklim melalui pengaturan pola dan pergiliran tanaman di setiap daerah irigasi,
2. Tersedianya sumberdaya dan kearifan lokal untuk Pertanian Cerdas Iklim (CSA),
3. Meningkatnya partisipasi dan kemandirian kelembagaan petani dalam menangani dampak perubahan iklim,
4. Terlaksananya plot percontohan adopsi teknologi pertanian dan pemberdayaan kelembagaan petani dan organisasi petani lainnya dalam upaya peningkatan produktivitas, produksi dan pendapatan petani,
5. Meningkatnya kemampuan Petani dan Penyuluh Pertanian dalam budidaya yang tahan (adaptif) terhadap perubahan iklim,
6. Berkurangnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK),
7. Berkurangnya resiko gagal panen,
8. Meningkatnya Intensitas Pertanaman (IP), produksi dan produktivitas tanaman, dan
9. Meningkatnya pendapatan petani di DI dan DIR wilayah SIMURP.

Penerima Manfaat dari Proyek SIMURP, antara lain:

1. Masyarakat Petani anggota Kelompok Tani (Poktan) yang juga merupakan anggota dari Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan/atau Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A),
2. Kelompok Tani (Poktan),
3. Kelompok Wanita Tani (KWT),
4. Kelompok Pemuda Tani (KPT), Khusus Komponen B
5. Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP),
6. Penyuluh dan BPP.

Pelaksanaan kegiatan SIMURP di 8 (delapan) provinsi yang tersebar di 17 kabupaten dan 76 BPP yang merupakan cakupan wilayah 14 Daerah Irigasi dan 2 Daerah Irigasi Rawa,

Kegiatan NPIU SIMURP BPPSDMP Kementerian Pertanian TA. 2020, meliputi 9 (Sembilan) kegiatan, yaitu: (i) Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman SIMURP, (ii) Administrasi SIMURP, (iii) Penyusunan Program dan Kegiatan SIMURP, (iv) Forum Koordinasi SIMURP, (v) Pengawasan

dan Pendampingan Kegiatan SIMURP, (vi) Review dan Penelaahan Kegiatan dan Anggaran SIMURP, (vii) Publikasi SIMURP Melalui Media, (viii) Pengadaan Konsultan Kegiatan SIMURP, dan (ix) Pengadaan Konsultan Pendukung Kegiatan SIMURP.

Adapun Kegiatan dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh 8 PPIU secara umum mencakup kegiatan; (i) *Trianing of Trainer (TOT)*, (ii) *Training of Farmer*, (iii) Penguatan BPP, dan (iv) Manajemen Satker. Kegiatan TOT dilaksanakan di 8 Provinsi dan diikuti oleh 366 peserta, sedangkan TOF diikuti oleh 1.800 peserta. Kegiatan penguatan BPP TA. 2020 dilaksanakan melalui penyediaan Sarpras IT secara pinjam pakai dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten, yang mendapatkan Sarpras tersebut dari hibah Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi yang dibiayai dari SIMURP. Disamping penyediaan pinjam pakai Sarpras IT juga menerima dukungan biaya paket internet dan biaya dukungan penguatan materi CSA.

Dari 76 BPP yang mendapatkan kegiatan SIMURP, 20 BPP telah menerima Sarpras IT melalui pembiayaan APBN, dan seyogianya 56 BPP akan mendapatkan Sarpras IT dari SIMURP tetapi dikarenakan ada 1 (satu) BPP tidak dalam wilayah Daerah Irigasi, maka oleh Pemda dibatalkan, hal ini menyebabkan BPP yang menerima pinjam pakai Sarpras IT dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten menjadi 55 BPP.

Secara garis besar alokasi anggaran manajemen satker diperuntukkan untuk membiayai; (i) Belanja Honor Operasional Satuan Kerja dan Tim, (ii) Belanja Honor Output Kegiatan, (iii) Belanja Perjalanan Dinas, (iv) Belanja Sewa Kendaraan Operasional, dan hal-hal yang telah disetujui oleh PPK Pusat atau Manajer SIMURP NPIU BPPSDMP dengan merevisi POK kegiatan.



Gambar 16. Pertemuan Sistem Pengendalian Intern Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian dan Forum Koordinasi Proyek SIMURP di Hotel Permata Bogor, 12 – 14 Maret 2020



Gambar 17. Pertemuan Evaluasi ToF dan ToT SIMURP Kementan Berbasis CSA, 21-22 Desember 2020



Gambar 18. ToF Climate Smart Agriculture (CSA) SIMURP di Kecamatan Pagaden, Subang 14-16 September 2020.

f. Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terpadu (IPDMIP) untuk Peningkatan Kapasitas Petani.

Proyek Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terintegrasi (IPDMIP) dirancang untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam mengatasi berbagai kendala dan meningkatkan produktivitas pertanian, serta mengurangi kemiskinan di perdesaan, mempromosikan kesetaraan gender dan meningkatkan gizi. IPDMIP meningkatkan nilai pertanian irigasi berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan dan sumber penghidupan di perdesaan. Proyek ini mengadopsi pendekatan penetapan sasaran yang inklusif di daerah irigasi sehingga menguntungkan semua petani yang aktif. Namun demikian, IPDMIP menggunakan strategi penetapan sasaran yang mempertimbangkan tingkat kemiskinan yang ada untuk menjangkau rumah tangga yang paling

termarginalkan (misalnya: miskin, perempuan, pemuda, petani di daerah hilir, daerah-daerah dengan irigasi yang kurang memadai). IPDMIP menjangkau 900.000 rumah tangga sasaran yang terdiri atas 4 juta penerima manfaat dengan cakupan wilayah seluas 450.000 ha di 16 provinsi (5 provinsi di Sumatera; 4 provinsi di Jawa; 2 provinsi di Kalimantan, 3 provinsi di Sulawesi; 2 provinsi di Nusa Tenggara), dan 74 kabupaten. IPDMIP mengutamakan rehabilitasi sistem irigasi yang dipasok oleh waduk di daerah-daerah yang selama ini belum mendapat bantuan. Periode pelaksanaan proyek akan dimulai pada tahun 2017 selama 6 tahun dan akan selesai pada tahun 2022. Proyek terdiri atas: (i) **Komponen 1.** Penguatan Kerangka Kerja Kebijakan dan Kelembagaan untuk Pertanian Irigasi; (ii) **Komponen 2.** Perbaikan Pengelolaan Sistem Irigasi; (iii) **Komponen 3.** Perbaikan Infrastruktur Irigasi; dan (iv) **Komponen 4.** Peningkatan Pendapatan Pertanian Irigasi.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh National Project Implementing Unit (NPIU) IPDMIP Kementerian Pertanian meliputi berbagai kegiatan yang berkenaan dengan manajemen untuk keperluan koordinasi kegiatan dalam aspek teknis substansi dan aspek administrasi pelaksanaan program. Kegiatan yang menjadi tanggung jawab NPIU IPDMIP Kementerian Pertanian tahun 2020 meliputi: 1) Pengadaan konsultan internasional dalam rangka IPDMIP; 2) Pengadaan konsultan nasional dalam rangka kegiatan IPDMIP; 3) Pengadaan konsultan pendukung kegiatan IPDMIP; 4) Bimtek Pengelolaan Kesuburan Lahan; 5) Pengadaan Benih Padi Pokok/Label Ungu (Prov. Banten dan Jawa Tengah) IPDMIP; 6) Supervisi Kinerja Konsultan di Lapangan; 7) Rice Seed Modernization Study; 8) Pelatihan Untuk Tenaga Penyuluh dan Staf Lapangan; 9) Pelatihan untuk Ketua kelompok tani; 10) Pelatihan untuk Rumah Tangga Petani Terpilih; 11) Workshop Penggalan Minat Lembaga Layanan Keuangan; 12) Workshop Penyusunan AWPB amp; Rencana Pengadaan IPDMIP; 13) Workshop Rekonsiliasi Keuangan On Granting IPDMIP; 14) penguatan melalui informasi dan teknologi; 15) Penyebaran Informasi Pemberdayaan Penyuluhan Masyarakat Melalui Media Online; 16) Salari petugas IPDMIP; 17) Administrasi Kegiatan IPDMIP; 18) Revisi Pedoman :Petunjuk Pelaksanaan IPDMIP; 19) Pengawasan dan Pendampingan kegiatan IPDMIP; 20) Bimbingan Penyusunan Program dan Anggaran IPDMIP; 21) Bimbingan Pengelolaan Keuangan IPDMIP; 22) Bimbingan pengadaan barang dan jasa IPDMIP; 23) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan IPDMIP; 24) Publikasi IPDMIP Melalui Media; 25) Pengembangan AOR Pusat Penyuluhan Pertanian; dan 26) Pemeliharaan Kendaraan Operasional dan Peralatan Kantor.



Gambar 19. Workshop Rekonsiliasi Keuangan On-Granting IPDMIP Triwulan III Tahun Anggaran 2020 di Hotel Aston Mataram, 21 Oktober 2020



Gambar 20. Pre-test bagi para Peserta Sekolah Lapangan(SL) IPDMIP di Desa Sagalaherang Kecamatan Panawangan memasuki tahap lanjutan, tanggal 09 September 2020.

g. Layanan Dukungan Manajemen Satker

Layanan dukungan manajemen merupakan kegiatan/ penyusunan dokumen pendukung terlaksananya seluruh kegiatan yang berkaitan dengan administrasi, perkantoran dan pelatihan berupa antara lain kegiatan Perencanaan, Identifikasi Kebutuhan Latihan (IKL), Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi, Pasca Diklat, Kerjasama, Keuangan, Organisasi dan Kepegawaian, serta Evaluasi dan pelaporan. Dukungan manajemen termasuk dukungan terhadap kegiatan pelaksanaan UPSUS, dengan adanya dukungan manajemen, operasional kegiatan berjalan efektif, efisien dan akuntabel. Anggaran Layanan dukungan Manajemen.



Gambar 21. Kunjungan Kerja dalam rangka Penguatan Tugas, Fungsi BPP serta Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Mendukung Percepatan Program Pembangunan Pertanian di Kabupaten Lamongan, 18 September 2020

3) Capaian Kinerja Pendidikan Pertanian (Politeknik Pembangunan Pertanian)

Capaian kinerja merupakan realisasi fisik dari masing-masing kinerja/output utama Badan PPSDMP selama tahun 2020 dengan cara membandingkan antara output yang dicapai dengan rencana atau target yang telah ditetapkan

Capaian Kinerja Pendidikan Pertanian didukung oleh Kinerja, anatara lain:

a. Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi pada Politeknik Pembangunan Pertanian

Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) adalah Perguruan Tinggi Kedinasan milik Kementerian Pertanian. Dalam menyelenggarakan program Diploma IV dan Diploma III bertujuan menyiapkan dan memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) tingkat ahli yang berwawasan agribisnis dengan penguasaan teknis manajerial yang mampu secara mandiri mengadakan dan mengembangkan sistem usaha agribisnis secara produktif dan efisien untuk menunjang pembangunan pertanian.

Dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi bagi aparat pertanian, Polbangtan membaginya dalam empat komponen yaitu : 1) Perencanaan Perkuliahan; 2) Pelaksanaan Perkuliahan; 3) Monitoring dan Evaluasi; dan 4) Kegiatan pendukung penyelenggaraan pendidikan. Kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pendidikan baik dari perencanaan sampai dengan dukungan pendidikan merupakan komponen yang saling berkaitan satu sama lain, kegiatan tersebut yaitu sebagai berikut : 1) Perencanaan Perkuliahan yang terdiri dari

Persiapan Pembelajaran dan Rekrutmen Mahasiswa; 2) Pelaksanaan Perkuliahan yang terdiri dari kegiatan Semester Ganjil dan Semester Genap; 3) Pelaporan dan Evaluasi yang terdiri dari Kegiatan Ujian Tengah dan Akhir Semester; 4) Dukungan Kegiatan Pendidikan lainnya yang terdiri dari Matrikulasi, Pembinaan Karakter Mahasiswa, Pengembangan Mahasiswa Melalui Seminar, Wisuda, Pengembangan Kompetensi Lulusan, Pengenalan Kehidupan Kampus dan Akademik Kemahasiswaan.

Pendidikan formal Diploma IV ditempuh selama delapan semester untuk menyelesaikan 144 s.d 156 SKS dengan Program Studi Agribisnis Hortikultura, Agribisnis Peternakan, Penyuluhan Perkebunan Presisi, Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, Teknologi Benih, Teknologi Pakan Ternak, dan Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan sementara Pendidikan formal Diploma III ditempuh selama enam semester untuk menyelesaikan 111 s.d 113 SKS dengan Program Studi Budidaya Tanaman Hortikultura, Budidaya Tanaman Perkebunan, Budidaya Ternak, Kesehatan Hewan, Tata Air, Teknologi Hasil Perkebunan, Teknologi Hasil Pertanian, dan Teknologi Mekanisasi Pertanian.

Capaian Output Penyelenggaran Pendidikan Vokasi Pertanian Program Diploma IV dan Diploma III Tahun Akademik 2019/2020 sebanyak 4.682 orang mahasiswa dari target 5.146 orang siswa telah mewisuda mahasiswa sebanyak 990 orang. Dalam hal ini capaian sebesar 90,98%, hal ini dikarenakan penerimaan mahasiswa hanya untuk 1 Rombel (Kelas) untuk setiap jurusan dikarenakan refocusing anggaran dalam rangka penanganan Covid-19.



Gambar 22. Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pendidikan Vokasi Pertanian Tahun 2020 di Hotel Arch, Bogor 19 – 21 Januari 2020



Gambar 23. Launching Smart Green House di Polbangtan Bogor untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan Vokasi Pertanian, 15 Desember 2020

b. Fasilitasi Pendidikan Formal S2 dan S3 melalui Tugas Belajar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 10/Permentan/OT.140/3/2015, tanggal 13 Maret 2015. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian cq. Pusat Pendidikan Pertanian berupaya untuk mewujudkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian melalui pendidikan formal bagi aparatur sipil negara lingkup Kementerian Pertanian untuk mengikuti Pendidikan tinggi Program S2 dan S3 yang dilaksanakan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri Mitra diantaranya 1) Institut Pertanian Bogor di Bogor; 2) Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta; 3) Universitas Diponegoro di Semarang; 4) Universitas Hasanuddin di Makassar; 5) Universitas Andalas di Padang; 6) Universitas Brawijaya di Malang; 7) Universitas Sebelas Maret di Surakarta; 8) Universitas Sumatera Utara di Medan; 9) Universitas Indonesia di Depok; 10) Universitas Jenderal Soedirman di Purwokerto; 11) Universitas Padjajaran di Bandung; 12) Institut Teknologi Bandung di Bandung; dan 13) Universitas Airlangga di Surabaya.

Kinerja yang dilakukan untuk mendukung Kinerja Fasilitasi Pendidikan Formal S2 dan S3 Bagi Aparatur Pertanian Melalui Tugas Belajar, meliputi : 1) Penyusunan RIPTB; 2) Bantuan Beasiswa Program Tugas Belajar S2; 3) Bantuan Beasiswa Program Tugas Belajar S3; 4) Koordinasi dan Evaluasi Tugas Belajar dengan 13 Perguruan Tinggi; 5) Pembekalan, Pengawasan dan Pendampingan Tugas Belajar Dalam Negeri; 6) Fasilitasi Pertukaran; 7) Penyempurnaan Pedoman dan Pengembangan SITAGAR. Kinerja pengembangan kapasitas aparatur pertanian melalui program tugas belajar S2 dan S3 dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian cq. Pusat Pendidikan Pertanian bekerjasama dengan tiga belas Perguruan Tinggi Negeri Mitra.

Capaian Kinerja Fasilitas Pendidikan Formal S2 dan S3 Melalui tugas belajar Tahun 2020 adalah 100%, yang terdiri dari Fasilitas Pendidikan Formal Program Magister (S2) sejumlah 169 orang dan Pendidikan Formal Program Doktor (S3) sejumlah 74 orang sehingga total 243 orang. Pada Tahun 2020 sudah melakukan seleksi calon tugas belajar namun di refocusing anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 sehingga penetapan calon tugas belajar semester 1 di tunda dan akan dilaksanakan pada tahun 2021.



Gambar 24. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tugas Belajar Program Magister dan Doktor, Kota Batu, Malang, Jawa Timur, 23 April 2020

c. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya

Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi berbasis Kompetensi dengan langkah operasional sebagai berikut:

Dalam mewujudkan SDM pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing dilakukan melalui penguatan pendidikan vokasi di bidang pertanian (Pusat, Polbangtan dan SMK-PP UPT). Penguatan Pusat Pendidikan Pertanian, Polbangtan dan SMK-PP dapat ditempuh salah satunya dengan meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan vokasi melalui kegiatan diklat, seminar, pelatihan, magang, maupun studi banding. Harapannya, setelah melalui serangkaian kegiatan tersebut, kemampuan ASN, dosen dan Guru serta tenaga kependidikan lainnya dalam memberikan pelayanan guna menghasilkan lulusan yang profesional, mandiri, dan berdaya saing dilakukan Fasilitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan Vokasi Pertanian melalui kegiatan sebagai berikut :

1) Penelitian/ Kaji Widya

Politeknik Pembangunan Pertanian dan Sekolah Menengah Kejuruan adalah lembaga pendidikan tinggi dan menengah milik

Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam rumpun ilmu pertanian terapan untuk mendukung pembangunan pertanian. Lembaga ini dibentuk untuk membantu pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian dalam menyiapkan sumberdaya manusia bidang pertanian yang tangguh dan mampu bersaing dengan kondisi global yang ada saat ini.

Menurut UU No 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Nasional Pasal 20 Ayat 2, dinyatakan bahwa lembaga tinggi mempunyai tugas wajib menjalankan Tri Dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Menurut Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang disebutkan dalam Pasal 2 Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dengan demikian jelas, bahwa suatu perguruan tinggi salah satu tugas utamanya adalah melaksanakan penelitian.

Polbangtan adalah lembaga pendidikan tinggi, sehingga salah tugas utamanya adalah melaksanakan kegiatan penelitian. Permenristek Dikti 44 Tahun 2015 pasal 1 ayat 11, kegiatan penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Dengan demikian, perguruan Tinggi dituntut untuk dapat menghasilkan inovasi yang dapat memberikan kemanfaatan sosial ekonomi bagi masyarakat secara luas. Salah satu ciri dari perguruan tinggi yang bermutu adalah mampu menghasilkan lulusan yang berpengetahuan, terdidik dan terampil dan kemampuan iptek dan inovasi keahlian SDM dalam melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek. Sebagai lembaga pendidikan tinggi, Polbangtan juga dituntut untuk dapat menghasilkan inovasi yang dapat memberikan kemanfaatan sosial ekonomi bagi masyarakat secara luas. Pemerintah melalui Kemenristek Dikti, mengharapkan Perguruan Tinggi harus lebih didorong dan difasilitasi untuk dapat menghasilkan lebih banyak lagi inovasi yang bermanfaat langsung pada masyarakat. Untuk dapat menjalankan kegiatan penelitian yang bermutu, membantu

pemerintah memecahkan masalah di masyarakat, penguasaan teknologi dan inovasi, dan pada akhirnya memberikan kemanfaatan yang besar bagi kesejahteraan masyarakat. Setiap tahunnya Polbangtan menyiapkan anggaran untuk kegiatan penelitian.

2) Profesionalisme Staff

Dinamika penduduk Indonesia ditinjau dari kualitas, pasar tenaga kerja, tingkat pendidikan, mobilitas, dan aspek gender akan sangat berpengaruh terhadap keragaan pembangunan pertanian di masa mendatang. Dalam kaitan ini ada 3 (tiga) aspek yang perlu mendapat perhatian lebih yaitu: (a) meningkatnya permintaan terhadap produk-produk pertanian, baik dalam Jumlah, kualitas, dan keragamannya, (b) meningkatnya ketersediaan tenaga kerja, dan (c) meningkatnya tekanan permintaan terhadap lahan untuk penggunaan non-pertanian (pemukiman, tapak industri, infrastruktur ekonomi). Meningkatnya permintaan terhadap produk-produk pertanian dapat dipandang sebagai peluang sekaligus sebagai tantangan pembangunan pertanian. Peningkatan permintaan mengandung arti tersedianya pasar bagi produk-produk pertanian. Di sisi lain, peningkatan permintaan produk pertanian akan menimbulkan tekanan yang lebih besar untuk memacu peningkatan produksi.

Walau melimpahnya ketersediaan tenaga kerja di perdesaan kondusif bagi pertumbuhan sektor pertanian, namun di sisi lain merupakan beban bagi sektor pertanian karena pendapatan buruh tani dan produktivitas tenaga kerja sektor pertanian semakin sulit ditingkatkan. Selain itu, melimpahnya tenaga kerja di sektor pertanian justru menciptakan persoalan baru yaitu terjadinya fragmentasi lahan dan menurunnya luas penguasaan lahan per rumah tangga yang akan melahirkan lebih banyak kemiskinan di sektor pertanian untuk masa yang akan datang.

Dihadapkan pada dua issue diatas maka pengembangan kompetensi dan profesionalisme SDM Pertanian. Upaya pengembangan kompetensi dan profesionalisme tersebut tidak hanya untuk petani dan pelaku usaha pertanian saja, tetapi juga mencakup aparatur pertanian. Pengembangan kompetensi dan profesionalisme aparatur pertanian (dalam hal ini ASN lingkup Pendidikan Pertanian) ditujukan agar aparatur memiliki semangat dan motivasi kerja yang tinggi dengan tetap menjunjung tinggi kekompakan dan rasa kekeluargaan yang kuat antar sesama karyawan.

Capaian Kinerja Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya adalah 104,71% dalam hal ini *refocusing* anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 mengakibatkan sasaran yang semula dapat memfasilitasi 315 orang menjadi 191 orang hanya terealisasi sebanyak 200 orang. Sehingga biaya penelitian bagi dosen dan kajiwidya dilakukan pengurangan dan dilaksanakan berkelompok kajian serta pengurangan kegiatan peningkatan kompetensi bagi ASN di Pusdiktan, Polbangtan dan SMK-PP.



Gambar 25. Rapat Koordinasi Teknis Pendidikan Vokasi Pertanian Tahun 2020 Dilaksanakan Pada Tanggal 19-21 Januari 2020 di Hotel Arch Bogor.



Gambar 26. Pembukaan kegiatan persiapan pembelajaran semester genap tahun akademik 2019/2020 di Grand Asana Pangrango Hotel, Bogor, 07-09 Februari 2020.

d. Pendampingan Kebijakan Strategis Pembangunan Pertanian di Kawasan Pertanian dan Kawasan Perbatasan

Dalam rangka penguatan sinergis antara arah kebijakan BNPP dengan BPPSDMP, dilakukan kerjasama antara Pusat Pendidikan Pertanian

dengan Kedeputan Potensi Kawasan Perbatasan Darat untuk membangun sumber daya manusia pertanian di wilayah perbatasan melalui Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat dan Praktik Kerja Lapang. Kinerja ini dilaksanakan oleh Dosen dan Mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian, yang dilaksanakan di 3 wilayah perbatasan darat yaitu : Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur dan Papua.

Secara operasional Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh dosen dan/atau Mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian, sedangkan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan oleh Mahasiswa Polbangtan dengan bimbingan Dosen Polbangtan bekerja sam dengan Penyuluh Pertanian dan petugas pemerintah setempat. Adapun Polbangtan yang melakukan Praktik Kerja Lapangan adalah : Polbangtan Medan, Polbangtan Bogor, Polbangtan Yogya – Magelang Satker D.I Yogyakarta, Polbangtan Malang, Polbangtan Gowa dan Polbangtan Manokwari.

Sementara capaian kinerja untuk Pendampingan Kebijakan Strategis Pembangunan Pertanian di Kawasan Pertanian dan Kawasan Perbatasan adalah 100%. Refocusing anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 mengakibatkan sasaran yang semula dapat memfasilitasi 1.215 orang mahasiswa menjadi 550 orang. Dalam hal ini hanya fasilitasi terhadap Mahasiswa Polbangtan Bogor dan Manokwari yang telah melakukan pendampingan di perbatasan dan Polbangtan lainnya hanya melaksanakan pendampingan di kawasan pertanian (Konstratani) di sekitar Wilayah Kampus.



Gambar 27. Rapat Koordinasi Pendampingan Mahasiswa/Alumni di Sentra Produksi Pangan dan Program Pengabdian Masyarakat di Kawasan Perbatasan Tahun 2020, 19-21 Februari 2020 di Hotel Platinum Yogyakarta



Gambar 28. Petani dan penyuluh tanam padi di kawasan perbatasan Kabupaten Keerom Yang untuk mendukung Ekspor Pangan ke Negara Tetangga

e. Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian

Sektor pertanian saat ini dihadapkan pada tantangan menurunnya minat para pemuda untuk bekerja pada sektor ini. Pemuda di pedesaan lebih memilih bekerja pada sektor informal di kota, meskipun ketrampilan yang dimiliki tidak memadai. Kondisi ini menyebabkan mengalirnya arus tenaga kerja pedesaan ke perkotaan. Disisi lain sarjana pertanian sedikit yang memilih untuk bekerja di sektor pertanian. Rendahnya jumlah tenaga kerja terdidik yang bekerja di sektor pertanian dan dengan semakin terbukanya akses khususnya pendidikan sarjana pertanian. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan melalui Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian. Melalui kegiatan ini peserta didik akan bertindak sebagai agripreneur atau pengusaha pertanian sekaligus sebagai penggerak dan pencipta lapangan kerja disektor pertanian.

Kegiatan Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian meliputi :

- 1) Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian Bagi Peserta Didik dan Alumni
 1. Tahap penyadaran dan penumbuhan
 - Pertemuan Koordinasi
 - Workshop Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian
 - Penetapan Calon Wirausahawan Muda Pertanian
 - Evaluasi Wirausahawan Muda Pertanian
 - Fasilitasi Penelitian Strategis Kompetitif dalam rangka penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian
 2. Tahap Pengembangan

- Milenial Indonesian Agropreneur 4.0 2nd
 - Pendampingan dan Pengawasan Eirausahawan Muda Pertanian Tahap Pengembangan
3. Tahap III Pemandirian
- Bimtek Pendampingan Wirausahawan Muda Pertanian
 - Pendampingan dan Pengawasan Wirausahawan Muda Pertanian Tahapa Pemandirian
- 2) Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian Bagi Pemuda Tani
- Workshop Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian oleh Pusat Penyuluhan Pertanian
 - Bantuan Penumbuhan Kewirusahaan Muda Pertanian Bagi Pemuda Tani
 - Pembinaan dan Pengawasan
- 3) Penumbuhan Petani Milenial Berorientasi Ekspor
- Workshop Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian oleh Pusat Pelatihan Pertanian
 - Bantuan Penumbuhan Kewirusahaan Muda Pertanian Bagi Petani Milenial
 - Pembinaan dan Pengawasan

Capaian kinerja untuk kegiatan Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian dilakukan setelah sasaran Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian bagi Pemuda Tani (KEP) 850 Kelompok dan Penumbuhan petani milenial berorientasi ekspor (P4S) 290 Kelompok di *refocusing* sehingga hanya Penumbuhan wirausahawan muda pertanian bagi peserta didik dan alumni (Milenial) sebanyak 774 kelompok dan tercapai semua 100% dikarenakan telah disalurkan sebelum *refocusing* anggaran



Gambar 29. Tarik Minat Milenial Jadi Petani Lewat Kegiatan Wirausaha Muda Pertanian, Yogja Tahun 2020



Gambar 30. Sekretaris BPPSDMP Kementan, Siti Munifah saat berkunjung ke kebun petani milenial di Sumba Barat Daya, NTT. 12 November 2020

f. **Peningkatan Kualitas Pembelajaran pada SMK-PP**

Salah satu upaya Kementerian Pertanian dalam rangka membangun sektor pertanian adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia Pertanian tingkat terampil, melalui pendidikan menengah di SMK-PP. SMK-PP sebagai salah satu lembaga pendidikan menengah kejuruan di bidang pertanian harus dapat mempersiapkan sumberdaya manusia yang memiliki *comparative advantage* dan *competitive advantage* bagi pembangunan khususnya di bidang pertanian.

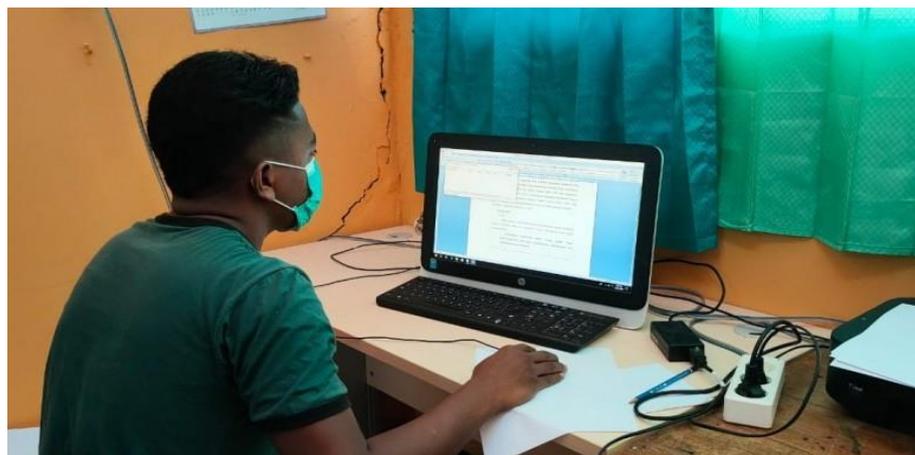
Untuk mempersiapkan tenaga kerja yang terampil di tingkat pendidikan menengah di bidang pertanian yang dapat memenuhi permintaan pasar kerja Nasional dan Internasional, maka SMK-PP berusaha mengembangkan potensi yang dimiliki dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan adanya peningkatan kelembagaan yang terus dilakukan di SMK-PP, diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan daya saing.

SMK-PP dalam pengembangannya melakukan pendidikan pertanian yang berbasis pada kompetensi keahlian di bidang Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura, Agribisnis Tanaman Perkebunan, Agribisnis Ternak Ruminansia, Agribisnis Ternak Unggas, Perawatan Kesehatan Hewan, Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian, dan Agribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan Tanaman. Dalam pengembangan pengajaran, SMK-PP sejak tahun 2010 sudah menerapkan Kurikulum 2013, kurikulum ini merupakan pengembangan ke arah kurikulum yang mengutamakan potensi wilayah yang ada di daerah sehingga kebutuhan Praktek Siswa lebih besar dibandingkan dengan SMK lainnya.

Peningkatan Kualitas Pembelajaran pada SMK-PP dilakukan melalui 3 metoda fasilitasi pembiayaan, yaitu : 1) SMK-PP UPT, biaya bantuan pembelajaran secara penuh dengan nilai bantuan per siswanya Rp. 10.000.000, 2) SMK-PP ex-UPT, biaya bantuan pembelajaran hanya Rp. 2.500.000 per siswanya dan 3) SMK-PP Binaan, hanya fasilitasi pengadaan alat praktek siswa sebesar Rp.400.000,- Dengan jumlah siswa sebanyak 22.427 orang untuk 94 SMK-PP Binaan Kementerian Pertanian namun hanya sebanyak 1.876 orang yang dapat difasilitasi Peningkatan Kualitas Pembelajaran pada SMK-PP dikeranakan refocusing anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 sehingga capaian kinerja sebesar 100%.



Gambar 31. Pelatihan persiapan uji sertifikasi profesi bagi para siswa kelas XII SMK-PP Banjarbaru April 2020



Gambar 32. SMKPP Negeri Kupang Optimis Lahirkan Generasi Pertanian dari Timur Indonesia Tahun 2020

g. Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian (*Teaching Factory, DII*).

Sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan rutin di Pusat Pendidikan Pertanian. Revitalisasi Pertanian ditujukan untuk menjadikan Pertanian sebagai rumpun kekuatan perekonomian nasional. Selain itu, revitalisasi pertanian juga dimaksudkan untuk menciptakan lapangan kerja bagi penduduk pedesaan, serta mengurangi kemiskinan. Revitalisasi pertanian dilaksanakan melalui pembangunan pertanian yang mengedepankan tumbuhnya usaha-usaha pertanian, baik hulu, on-farm, hilir maupun usaha jasa penunjang.

Guna menghasilkan Sumberdaya Manusia yang berkualitas ditempuh melalui pendidikan formal dan pelatihan, serta penyuluhan yang berkelanjutan. Pusat Pendidikan Pertanian, merupakan eselon II lingkup BPPSDMP dengan UPT Pendidikan Tinggi (Polbangtan) lembaga pendidikan tinggi yang mendidik mahasiswa penyuluh pertanian dalam jenjang pendidikan D-IV dan D-III sementara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK-PP) lembaga pendidikan menengah yang mendidik siswa bidang agribisnis. Untuk mendukung pencapaian tujuan diatas, selama proses belajar mengajar perlu adanya fasilitas sarana dan prasarana yang berstandar.

Capaian kinerja untuk kegiatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian adalah 100% dikarenakan telah dilaksanakan pembangunan dan belanja modal (sudah kontrak) sebelum refocusing anggaran sehingga tidak berubah terhadap output di setiap satker



Gambar 33. Sarana Prasarana SMK-PP Sembawa

h. Layanan Dukungan Manajemen Pendidikan.

Kerangka regulasi dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan dan penjabaran peran Pusat Pendidikan Pertanian dalam mencapai sasaran strategis. Selain itu regulasi tersebut dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian khususnya di tingkat daerah. Pusat Pendidikan Pertanian berperan sebagai regulator yang menetapkan norma, standar, pedoman dan kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh UPT pendidikan pertanian dan lembaga pendidikan binaan Kementerian Pertanian.

Pusat Pendidikan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pendidikan vokasi pertanian, rencana dan program pendidikan pertanian, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pendidikan Pertanian menyelenggarakan fungsi-fungsi :1)

Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kerja sama, dan pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pendidikan pertanian; dan 2) Pelaksanaan pengembangan dibidang pendidikan pertanian.

Struktur organisasi Pusat Pendidikan Pertanian terdiri dari 3 bidang dan 6 subbidang dan memiliki 10 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terbagi dalam 11 Satuan Kerja (Satker). Sebagai institusi yang menangani Norma, Pedoman, Standar dan Kebijakan Pendidikan Pertanian dan Kelembagaan Pendidikan melaksanakan berbagai kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Pendidikan sebagai berikut : (1) Koordinasi Teknis Pendidikan Vokasi Pertanian; (2) Koordinasi Teknis Pendidikan Menengah Pertanian; (3) Profesionalisme Staf; (4) Penyusunan SBK Pendidikan 2021 dan Persiapan, Pembahasan, Serta Penyusunan Anggaran 2021; (5) Administrasi Pendidikan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian; (6) Koordinasi Pimpinan; (7) Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan Pertanian; (8) Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pendidikan Pertanian; (9) Kegiatan Strategis Kementerian Pertanian dalam mendukung swasembada pangan berkelanjutan; (10) Pengembangan Kerjasama Dalam Negeri; (11) Pengembangan Kerjasama Luar Negeri; (12) Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian; (13) Pengembangan Kurikulum Politeknik Pembangunan Pertanian dan Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pertanian; (14) Dukungan Pendidikan Terhadap Kebijakan Strategis Kementan; (15) Persiapan Sertifikasi Profesi Pertanian; (16) Monitoring Pelaksanaan Sertifikasi Profesi Pertanian; (17) Pengembangan Karya Inovatif Mahasiswa; (18) Penerimaan Mahasiswa Baru; (19) Pembinaan

Generasi Muda melalui Saka Taruna Bumi dan Tata Kehidupan Kampus; (20) Karya Inovasi Siswa SMKPP; (21) Pertikabumi/Kepramukaan; (22) Transformasi Kelembagaan Pendidikan Tinggi dan Menengah Pertanian; (23) Penjaminan Mutu Pendidikan; (24) International Symposia Vocational Education; (25) Pembinaan Penerapan Teaching Factory; (26) Revitalisasi SMK Pertanian; (27) Forum Politeknik Pertanian; (28) Penghargaan Dosen Berprestasi 2020; (29) Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan; (30) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Tenaga Dosen dan PLP; (31) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Tenaga Guru; (32) Penyelenggaraan Penelitian Strategis 2020; (33) Dukungan Pendidikan Pertanian pada Penyelenggaraan PENAS; (34) Evaluasi Kegiatan (Triwulan 1 sd 4) serta Pembinaan dan Pengawasan Program, Anggaran dan Kegiatan 2020; dan (35) Evaluasi Program Pendidikan Pertanian (Semester I dan II).

Capaian kinerja untuk kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Pendidikan adalah 100% dikarenakan telah dilaksanakan oleh 6 Subbidang (layanan) dengan keterbatasan anggaran setelah refocusing anggaran dalam rangka penanganan Covid-19.

i. Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (YESS) untuk Peningkatan Kapasitas Petani.

Program ini kerja sama antara Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD).

Program YESS di tingkat Provinsi dilakukan oleh Provincial Project Implementation Unit (PPIU) yang terdapat di Polbangtan (Bogor, Malang dan Gowa) serta SMK-PP Banjarbaru. PPIU terdiri dari Project Manager, bidang program, bidang keuangan, bidang Monitoring dan Evaluasi, serta District Liason Officer (DLO) atau penghubung ke setiap kabupaten. Istandi terkit tingkat provinsi antara lain; Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan, lembaga Keuangan, KADIN, dll.

Pelaksanaan Kinerja di tingkat kabupaten akan dibantu oleh District Implementation Team (DIT) yang dibentuk pada Dinas yang menangani pertanian, terdiri dari Koordinator Pelaksana, Asisten Bidang Program, Asisten Bidang Keuangan, dan Asisten Bidang Monitoring dan Evaluasi. Disamping itu juga dibentuk Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten (District Coordination Team = DCT) yang diketuai oleh BAPPEDA, dengan anggota adalah Dinas terkait (Pertanian, Koperasi

dan UKM, Pemuda dan Olahraga, Ketenagakerjaan, KADIN, Lembaga Keuangan, dan organisasi/LSM kepemudaan.

Namun untuk tahun 2020 (tahun ke-2) program YESS hanya menargetkan 5 layanan belum menghasilkan output pemuda tani. Sehingga Capaian Kinerja yang dihasilkan 100%



Gambar 34. Sosialisasi KostraTani di BPP Pacet, Kabupaten Cianjur yang merupakan BPP Model Percontohan dari Youth Entrepreneurship and Employment Support Services Programme [YESS] di Cianjur, Jabar pada tanggal 24 Juli 2020.



Gambar 35. Program YESS, Lahirkan Wirausahawan Muda Pertanian di Perdesaan

j. Lulusan Politeknik Pembangunan Pertanian yang Mengikuti Permagangan (Retooling)

Kebijakan Revitalisasi Pertanian dilaksanakan untuk menjadikan pertanian sebagai tumpuan kekuatan perekonomian nasional, di samping untuk menciptakan lapangan kerja bagi penduduk pedesaan serta mengurangi kemiskinan. Revitalisasi Pertanian dilaksanakan

melalui pembangunan pertanian yang mengedepankan tumbuhnya usaha-usaha pertanian, baik di hulu, on-farm, hilir maupun usaha jasa penunjang.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian adalah eselon I Kementerian Pertanian yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab dalam mempersiapkan kebutuhan sumberdaya manusia (SDM) calon tenaga kerja yang diperlukan bagi perusahaan agribisnis. SDM calon tenaga kerja di berbagai level perlu disiapkan sejak masa pendidikan berjalan untuk mengisi formasi pada perusahaan agribisnis.

Salah satu kegiatan yang diperlukan untuk menyiapkan lulusan Polbangtan yaitu dengan mengembangkan kompetensi mahasiswa. Program Peningkatan Kompetensi Generasi Muda bagi Mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Lingkup Kementerian Pertanian ini sangat berguna untuk mempersiapkan peserta dan menghubungkan calon lulusan Polbangtan dengan user perusahaan. Permagangan penting dilakukan untuk memberikan bekal kemampuan yang baik bagi peserta ketika terjun ke lapangan dunia kerja, meliputi kemampuan Bintalfidis dan karakter, kemampuan budaya dan sikap mental serta kemampuan kompetensi dasar. Dua komponen awal yaitu bintalfidis dan karakter serta budaya dan sikap mental menjadi keunggulan lulusan permagangan dibandingkan lulusan dari universitas atau institusi pendidikan yang lain. Program permagangan tahun 2020 telah mampu menjaring lebih banyak user perusahaan tentang keberadaan Kampus Polbangtan sebagai wadah mempersiapkan generasi kedepannya, terbukti dengan serapan perusahaan terhadap alumni permagangan. Promosi dan ekspos kampus melalui program permagangan ini perlu dilanjutkan untuk lebih memantapkan keberadaan kampus Polbangtan ditengah industri.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan pengiriman mahasiswa untuk mengikuti Bimtek di perusahaan agribisnis seluruh Indonesia pada semester ke-8 sesuai dengan tugas akhir mahasiswa Polbangtan di sekolah. Pengiriman tersebut seluruhnya difasilitasi oleh Pusat Pendidikan Pertanian (Pusdiktan) bekerjasama Best Planter Indonesia (BPI) sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan yang mengkhususkan diri pada pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) Sawit yang bermoral, berkarakter & berkemampuan sangat siap untuk mengisi berbagai kekurangan para calon lulusan Polbangtan ini. Dengan demikian, diharapkan para lulusan Polbangtan akan mempunyai nilai tambah (added value) yang menjadi pembeda dari lulusan kampus lainnya, sehingga mampu bersaing di pasar kerja khususnya perkebunan kelapa sawit yang tersebar diseluruh Indonesia.

Sementara capaian kinerja kegiatan retooling adalah 100% dalam hal ini refocusing anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 mengakibatkan sasaran yang semula dapat memfasilitasi 250 orang menjadi 60 orang hanya terealisasi sebanyak 2 angkatan dengan setiap Angkatan 30 orang.

k. Layanan Perkantoran

Pelayanan perkantoran di UPT Pendidikan merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan kepada mahasiswa, dosen, pegawai atau stakeholders lainnya atas barang/jasa dan/atau pelayanan administratif dalam penyelenggaraan pendidikan pertanian yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

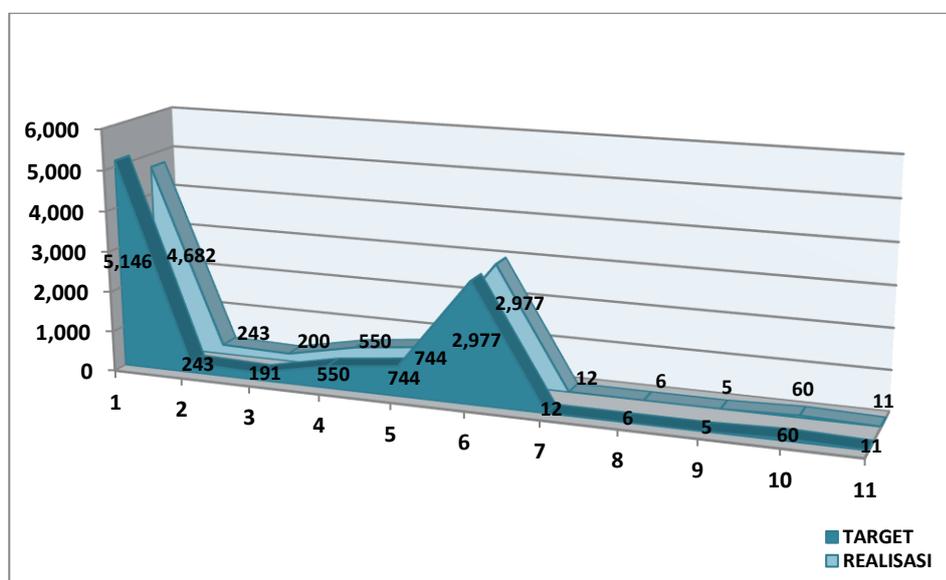
Pelaksanaan Layanan Perkantoran telah tercapai 100% yang berjalan di 11 Layanan UPT. Capaian layanan tersebut terbagi atas 2 komponen pembayaran, yaitu :

- 1) Pengelolaan gaji, honor dan tunjangan.
Pembayaran Gaji dan Tunjangan kepada pegawai dilakukan dengan cara transfer dari KPPN ke Rekening Bank masing-masing pegawai.
- 2) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
 - a) Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - b) Pemeliharaan Kendaraan Khusus;
 - c) Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor;
 - d) Perawatan Kendaraan bermotor Roda 4 dan 2;
 - e) Perawatan Sarana dan Prasarana Gedung;
 - f) Langganan Daya dan Jasa;
 - g) Operasional Perkantoran dan Pimpinan; dan
 - h) Pakaian Pegawai/Satpam..

Capaian Kinerja Pendidikan Pertanian tahun 2020 pada umumnya tercapai rata-rata mencapai 99,74%. Secara rinci realiasi kinerja Pusat Pendidikan Pertanian pada tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel.15 berikut:

Tabel 15.
Capaian Kinerja Pendidikan Pertanian

No.	OUTPUT	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi pada Politeknik Pembangunan Pertanian	Orang	5.146	4.682	90,98
2	Fasilitasi Pendidikan Formal S2 dan S3 melalui Tugas Belajar	Orang	243	243	100,00
3	Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	191	200	104,71
4	Pendampingan Kebijakan Strategis Pembangunan Pertanian di Kawasan Pertanian dan Kawasan Perbatasan	Orang	550	550	100,00
5	Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian	Kelompok	744	744	100,00
6	Peningkatan Kualitas Pembelajaran pada SMK-PP	Siswa	2.977	2.977	100,00
7	Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian (Teaching Factory, DII)	Satker	12	12	100,00
8	Layanan Dukungan Manajemen Pendidikan	Layanan	6	6	100,00
9	Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (YESS) untuk Peningkatan Kapasitas Petani	Layanan	5	5	100,00
10	Lulusan Politeknik Pembangunan Pertanian yang Mengikuti Permagangan (Retooling)	Orang	60	60	100,00
11	Layanan Perkantoran	Layanan	11	11	100,00



Garafik 10. Capaian Kinerja Pendidikan Pertanian (Pendidikan Menengah Pertanian)

4) Capaian Kinerja Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

Capaian Kinerja Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

didukung oleh beberapa Kinerja, yaitu:

- a. Pemantapan sistem perencanaan dan kerjasama Perencanaan program dan kegiatan berbasis kinerja merupakan restrukturisasi program dan anggaran berorientasi kepada keluaran (output) dan hasil (outcome) berdasarkan kebijakan dan prinsip akuntabilitas dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran dengan strategi meliputi:
 - (1) Koordinasi rencana program, anggaran dan kerjasama;
 - (2) Penajaman program skala prioritas;
 - (3) Implementasi E-proposal dalam penyusunan program dan kegiatan;
 - (4) Pengembangan jejaring kerjasama dalam dan luar negeri;
 - (5) Penyusunan, pemantauan, pembinaan dan penyempurnaan anggaran dan kegiatan berbasis kinerja;



Gambar 36. Sekretaris Badan, Dr. Ir. Siti Munifah, M.Si menyebutkan ada lima pertemuan sekaligus dalam kesempatan ini, diantaranya Rapat Teknis Perencanaan, Workshop Tim SPI, Workshop Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan, Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanian dan Workshop Penderasan Arus Informasi Pembangunan Pertanian Yogyakarta pada 24 s.d 26 Februari 2020

- b. Penguatan pengelolaan keuangan dan perlengkapan yang akuntabel Berfokus pada penerapan sistem pelaporan keuangan negara secara tertib dan menyeluruh dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dan aset negara melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang menunjang laporan keuangan Kementerian Pertanian dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), strategi tersebut meliputi:
 - (1) Intensifikasi dan ekstensifikasi PNBK;
 - (2) Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana untuk kebutuhan pelatihan, pendidikan dan penyuluhan;

- (3) Akuntabilitas laporan keuangan;
- (4) Pengawasan, pengendalian dan penyelesaian asset BMN dan keuangan;
- (5) Pengembangan tata kelola keuangan.



Gambar 37. Dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM Pengelola Keuangan lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Sekretariat Badan PPSDMP mengadakan Workshop Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Semester II TA 2019, S di Hotel Grand Mulya, Sukaraja Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin 21 Januari 2020

- c. Peningkatan kualitas layanan organisasi, hukum, kepegawaian, TU dan Rumah Tangga Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui proses penataan organisasi, ketatalaksanaan dan pemberdayaan SDM aparatur dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik. Strategi tersebut meliputi: (1) Perencanaan dan pengembangan kepegawaian; (2) Penyempurnaan organisasi dan tata laksana; (3) Fasilitasi peraturan perundangan; dan (4) Sosialisasi UU No. 19 Tahun 2013 dan penyelesaian peraturan perundangan turunannya.



Gambar 38. Koordinasi Pengelolaan Aplikasi Kepegawaian Berbasis On-Line, Semarang 11 – 13 Maret 2020



Gambar 39. Serah Terima Jabatan di PPMKP Ciawi – Bogor, 05 Juni 2020

d. Penguatan sistem evaluasi pelaporan dan kehumasan Pemantapan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Badan PPSDMP dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja serta peningkatan intensitas dan kualitas komunikasi melalui media informasi dalam rangka meningkatkan eksistensi dan citra positif Badan PPSDMP. Strategi meliputi:

- (1) Penguatan data SDM pertanian;
- (2) Pengembangan e-evaluation;
- (3) Pengendalian kegiatan melalui penerapan SPI;
- (4) Pengembangan dan penguatan sistem;
- (5) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- (6) Sistem pelaporan dan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP);
- (7) Pengelolaan informasi dan dokumentasi berbasis digital;

- (8) Penyebaran informasi melalui media cetak, elektronik, dan teknologi informasi;



Gambar 40. Rapat Koordinasi dalam rangka Konsolidasi dan Evaluasi Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Badan PPSDMP 2020, (Bogor, 26 – 28 November 2020)



Gambar 41. Rapat Pimpinan Tahun 2020, (Garut, 16 – 18 Januari 2020)

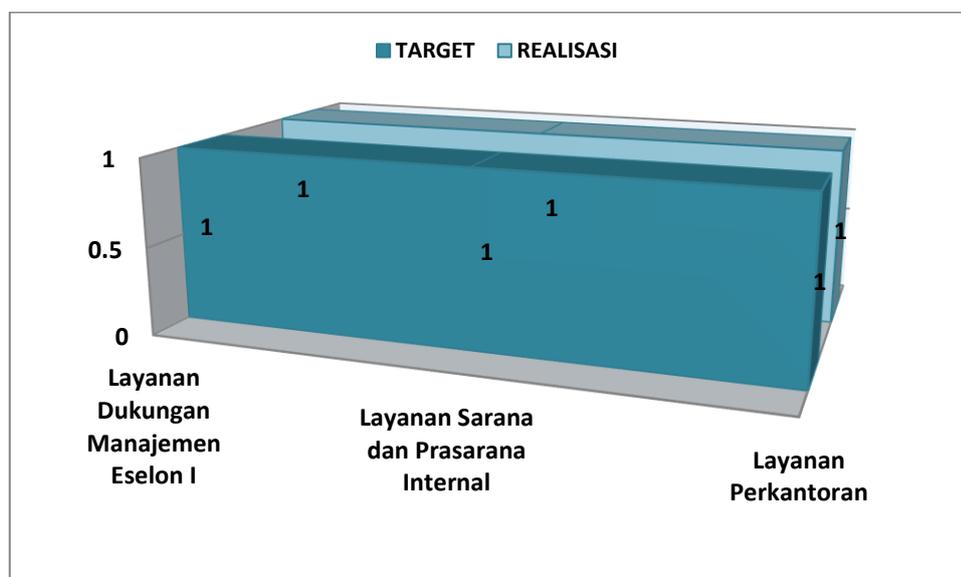


Gambar 42. Digitalisasi Informasi Lingkup Badan Tahun 2020

Capaian Kinerja Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2020 pada umum terrealisasi dengan rata-rata 100%, dan dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel. 16
Capaian Kinerja Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

No.	OUTPUT	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	1	1	100,00
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	100,00
3	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100,00



Grafik 11. Capaian Kinerja Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

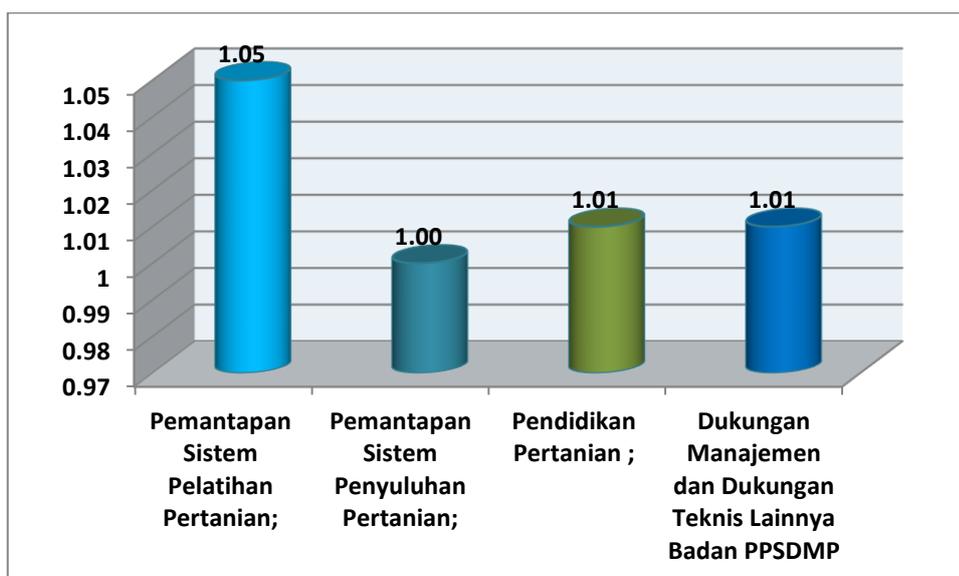
Berdasarkan capaian realisasi fisik dan keuangan kegiatan Badan PPSDMP pada tahun 2020, maka dapat diketahui capaian tingkat efisiensi (rasio *output* yang dicapai dengan input/anggaran yang digunakan), baik secara global maupun secara parsial menurut masing-masing eselon II lingkup Badan PPSDMP. Tingkat efisiensi tersebut disajikan pada Tabel 13. berikut ini.

Tabel 17.
Tingkat Efisiensi Kegiatan Badan PPSDMP Tahun 2020

NO	Keterangan	Realisasi Keuangan (%) (I)	Rata-rata Realisasi Fisik (%) (O)	Tingkat Efisiensi (O/I)
1.	Pusat Pelatihan Pertanian	98,83	103,89	1,05
2.	Pusat Penyuluhan Pertanian	98,45	98,16	1,00
3.	Pusat Pendidikan Pertanian	98,68	99,74	1,01
4.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan PPSDMP	98,72	100,00	1,01

Berdasarkan Tabel 17. diatas, dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan capaian tingkat efisiensi kegiatan Badan PPSDMP pada tahun 2020, maka capaian tingkat efisiensi pada keempat eselon II lingkup BPPSDMP pada tahun 2020 termasuk pada kategori efisien, karena seluruhnya mencapai nilai rasio lebih dari 1, yaitu

- 1,05 pada kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian;
- 1,00 pada kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian;
- 1,01 pada kegiatan Pendidikan Pertanian ;
- 1,01 pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan PPSDMP.



Grafik 12. Tingkat Efisiensi Kegiatan Badan PPSDMP Tahun 2020

C. Perkembangan Capaian Realisasi Anggaran dan Kinerja Tahun 2015 – 2020 Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

a) Capaian Realisasi Anggaran tahun 2015 sampai dengan 2020

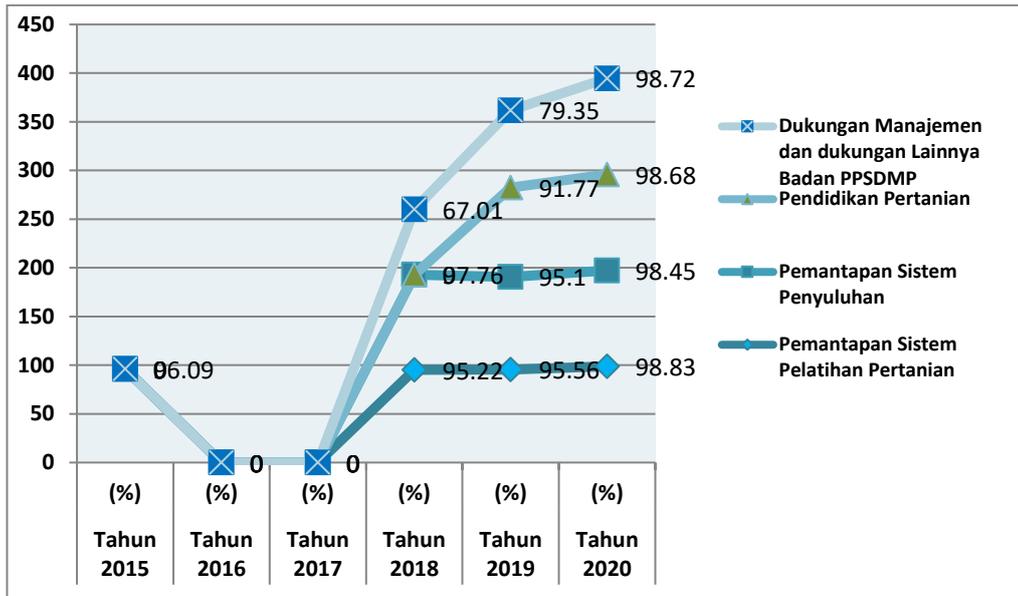
Capaian realisasi anggaran tahun 2015 sampai dengan 2020 pada umumnya tercapai akan tetapi pada tahun 2018 dan tahun 2020 realisasi anggaran Dukungan Manajemen dan dukungan Lainnya Badan PPSDMP tidak memuaskan dikarenakan pada tahun 2018 dan 2019 dikarenakan:

- Pengadaan yang sering gagal lelang atau peminat yang sedikit sehingga harus dilakukan lelang ulang sedangkan waktu terus berjalan
- Kurangnya komitmen pimpinan daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk Kinerja IPDMIP
- Pergantian pelaksana Kinerja di daerah yang sering terjadi dalam satu tahun sehingga perlu pemahaman kembali terhadap pedoman pelaksanaan
- Kinerja Sekolah Lapang belum semua lokasi dapat melaksanakan karena dilanda musim kekeringan sehingga tidak ada air, dan saluran irigasi yang belum direhab.
- Provinsi yang belum melakukan pengadaan benih dikarenakan harus melakukan revisi di DPA Perubahan.

Secara rinci Capaian Realisasi Anggaran tahun 2015 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada Tabel.18 berikut:

Tabel. 18
Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran tahun 2015 sampai dengan tahun 2020

NO	Program	Tahun 2015 (%)	Tahun 2016 (%)	Tahun 2017 (%)	Tahun 2018 (%)	Tahun 2019 (%)	Tahun 2020 (%)
1	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	96,09	92.90	96.97	95,22	95,56	98,83
2	Pemantapan Sistem Penyuluhan	94.17	96.31	90.32	97,76	95,10	98,45
3	Pendidikan Pertanian	95.40	92.10	94.55	94.90	91,77	98,68
4	Dukungan Manajemen dan dukungan Lainnya Badan PPSDMP	95.65	87.26	84.05	67,01	79,35	98,72



Grafik 13. Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran tahun 2015 sampai dengan tahun 2020

BAB IV. PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT

A. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan Badan PPSDMP pada tahun 2020 adalah pada masing-masing kegiatan utama secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pusat Pelatihan

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan pertanian pada tahun 2020 secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Seiring dengan adanya pandemic covid-19 yang berdampak terhadap refocusing kegiatan dan anggaran kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian
- b. Jadwal pelaksanaan kegiatan yang mundur dari jadwal yang telah ditetapkan

2. Pusat Penyuluhan Pertanian

Dalam penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian selama tahun 2020, permasalahan yang dihadapi dalam pemantapan sistem penyuluhan pertanian sebagai berikut:

- a. Adanya refocusing anggaran dan kegiatan penyuluhan pertanian sehingga berdampak terhadap:
 - (a) Tidak teralokasikannya anggaran pembelajaran bagi petani berupa demplot, Sekolah Lapangan (SL), dll;
 - (b) Tidak teralokasikannya anggaran dan kegiatan penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani menuju Korporasi;
 - (c) Tidak teralokasikannya anggaran dan kegiatan penumbuhan dan pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta;
 - (d) Tidak teralokasikannya anggaran dan kegiatan penumbuhan dan pengembangan Posluhdes;
 - (e) Tidak teralokasikannya anggaran dan kegiatan Adaptasi Teknologi Spesifik Lokasi.
- b. Dalam pelaksanaan tugasnya, ruang gerak penyuluh tidak optimal karena keterbatasan Alat Pelindung Diri (APD) dalam melakukan pengawalan dan pendampingan kegiatan penyuluhan di lapangan;
- c. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran kepada petani kurang optimal karena terkendala kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang berbeda di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota
- d. Pemerintah Daerah belum menerbitkan SK Penetapan PPPK, dikarenakan belum terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Gaji dan

Tunjangan PPPK, sesuai Pasal 7 ayat (3) Perpres 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK;

- e. Beberapa BKD dan Kanreg BKN belum sama persepsi terkait dengan kualifikasi pendidikan rumpun pertanian THL-TBPP yang dapat diangkat PPPK;
- f. Jumlah THL-TBPP yang lulus *passing grade* tidak semuanya diusulkan oleh Pemerintah Daerah untuk mengisi formasi PPPK tahap I;
- g. Penetapan PPPK oleh Bupati/Walikota belum dilengkapi dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT);
- h. Sebanyak 2.150 orang THL-TB Penyuluh Pertanian yang mengikuti seleksi PPPK tahun 2019, tidak lulus *passing grade*.
- i. Rendahnya tingkat pendidikan petani menyebabkan kemampuan dalam mengolah informasi dan mengadopsi teknologi relative sangat terbatas sehingga menghasilkan produk yang berkualitas rendah;
- j. Tidak tersedianya fasilitasi anggaran untuk menerapkan metode penyuluhan demonstrasi, sekolah lapangan (SL) dan FFD yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi karena adanya refocusing anggaran;
- k. Masih terdapat instansi daerah yang belum mampu memetakan sumberdaya pertanian di daerah secara komprehensif dan memiliki kecermatan dalam membuat konsep pemanfaatannya
- l. Keterbatasan akses dan hardware media informasi dan komunikasi yang dimiliki oleh petani dan penyuluh pertanian
- m. Latar belakang budaya yang majemuk mengakibatkan timbulnya multipersepsi terhadap introduksi inovasi dan teknologi baru
- n. Pada Tahun 2020, seiring dengan adanya pandemic covid-19 yang berdampak terhadap refocusing kegiatan dan anggaran kegiatan Penyuluhan Pertanian melalui Dana Dekonsentrasi di 34 provinsi serta kebijakan penerapan protokol kesehatan, maka berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan demonstrasi cara, Sekolah Lapangan (SL), Kursus Tani dan FFD. Kegiatan tersebut masih dilakukan di lokasi proyek *Integrated Participatory Development and Manajement Project* (IPDMIP) yang bersumber dari anggaran PHLN.

3. Pusat Pendidikan Pertanian

Permasalahan serapan anggaran selama pelaksanaan program dan kegiatan Pusdiktan Tahun 2020 yaitu (1) Pada Tahun 2020, seiring dengan adanya pandemic covid-19 yang berdampak terhadap refocusing kegiatan dan anggaran kegiatan Penyuluhan Pertanian; (2) Jadwal pelaksanaan kegiatan yang mundur dari jadwal yang telah ditetapkan

4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

- 1) Penerapan *e-planning* dalam perencanaan program dan anggaran masih belum konsisten;
- 2) Kualitas pelayanan keterbukaan informasi publik belum prima;

- 3) Efektivitas dan akuntabilitas kegiatan, serta pengendalian internal masih rendah;
- 4) Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan pegawai belum sepenuhnya optimal dan berkesinambungan;
- 5) Pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan, sehingga hasilnya belum optimal.

B. Upaya Tindak Lanjut

Dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan dan kendala tersebut akan ditempuh upaya sebagai berikut:

1. Pusat Pelatihan Pertanian

Dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan dan kendala tersebut akan ditempuh upaya sebagai berikut:

- a. Untuk tetap meningkatkan pengetahuan bagi penyuluh dan petani telah dilaksanakan program pelatihan online berbasis Learning Management System (LMS) dan Zoom Meeting dengan nama Bertani On Cloud (BOC). Dengan BOC maka peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan pertanian tetap dapat dilaksanakan tanpa terkendala jarak, ruang dan waktu.
- b. Meningkatkan koordinasi dalam penjadwalan kegiatan antar bidang lingkup Pusat Pelatihan Pertanian;

2. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian

- 1) Penyusunan Petunjuk Teknis dan SOP BPP Kostratani yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor: 265/Kpts/Ot.050/I/ 11/2020. Petunjuk teknis dan SOP ini dimaksudkan untuk dijadikan acuan bagi pengelola BPP dan stakeholder lainnya dalam mendukung percepatan penguatan, tugas, fungsi, dan peran BPP;
- 2) Peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) baik secara luring maupun daring;
- 3) Mendorong dan memotivasi Penyuluh Pertanian baik di pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa untuk mengoptimalkan pengawalan dan pendampingan kepada petani/poktan/gapoktan/KEP dalam upaya meningkatkan jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian serta penumbuhan dan pengembangan KEP menuju korporasi;
- 4) Penyebarluasan informasi dan materi penyuluhan melalui media cetak (Tabloid Sinar Tani, Majalah Swadaya dan Trubus) yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi Tahun 2020;
- 5) Penyebarluasan informasi dan materi serta kebijakan penyuluhan atau program utama Kementerian Pertanian secara daring/online, yaitu melalui

Program Mentan Sapa Petani dan Penyuluh (MSPP) serta Ngobrol Asyik Penyuluhan Pertanian (NGobras) yang dilakukan secara daring oleh Pusat Penyuluhan Pertanian setiap minggu;

- 6) Bersinergi dengan Eselon II Lingkup BPPSDMP dan Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian dalam penyediaan sarana dan prasarana IT di BPP Kostratani untuk optimalisasi penguatan tugas dan fungsi serta peran Kostratani sebagai Pusat Data dan Informasi, Pusat Gerakan pembangunan pertanian, Pusat pembelajaran, pusat konsultasi agribisnis dan pusat pengembangan jejaring kemitraan serta dalam upaya penumbuhan dan pengembangan KEP menuju korporasi;
- 7) Bersinergi dan koordinasi dengan para penyelenggara penyuluhan pertanian baik di pusat maupun daerah;
- 8) Bimbingan Teknis Penumbuhan dan Pengembangan serta peningkatan kapasitas KEP kepada Petugas pendamping dari Dinas Pertanian yang menangani urusan penyuluhan di 100 kabupaten/kota dan 27 provinsi.

3. Pusat Pendidikan Pertanian

Menyikapi kondisi tersebut, maka upaya yang dilakukan adalah : (1) Disiplin pelaksanaan program kegiatan dengan mengacu kepada jadwal palang yang telah ditetapkan (2) disiplin proses administrasi keuangan, sehingga cepat tercatat pada data SPAN – aplikasi SAS.

4. Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya.

- a. Perencanaan kegiatan dan anggaran yang antisipasi dalam menghadapi adanya kebijakan penghematan;
- b. Melakukan upaya pengendalian Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang masih terdapat kelemahan dalam pencatatan dan penatausahaan PNBP pada satker Badan PPSDMP;
- c. Renstra, RKT dan PK perlu ditelaah kembali dan disinkronkan dalam LAKIP;
- d. Memperkaya analisis hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sehingga dapat memberikan penjelasan/alasan strategis faktor keberhasilan atau kegagalan dan memberikan rekomendasi atau usulan perbaikan;
- e. Melakukan pemantauan PK secara periodik dan mengoptimalkan koordinasi, sinkronisasi antara bagian yang menangani perencanaan, bagian yang menangani evaluasi dan pelaporan
- f. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern di Lingkup BPPSDMP dan UPT, maka direkomendasikan agar 1) Meningkatkan kinerja Tim Satlak PI; 2) Perlu adanya "*knowledge sharing*" tentang SPI dengan melibatkan narasumber dari luar seperti Tim Pembina SPI (Itjen, BPK, BPKP); 3) Perlu sosialisasi dan forum-forum dengan melibatkan seluruh pegawai; 4) Memasukkan kinerja satlak PI dalam kontrak kinerja pimpinan/ Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

- g. Dalam rangka mengoptimalkan proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Lembaga Auditor (Itjen, BPK, BPKP) direkomendasikan agar: (1) penelusuran kerugian negara pada satker baru melalui forum pertemuan dengan pendampingan Itjen Kementan dan BPKP Pusat; (2) mengirimkan surat pemberitahuan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk memfasilitasi penyelesaian temuan Kerugian Negara pada Satker Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan yang sulit ditindaklanjuti; (3) pembinaan melalui kegiatan kunjungan pada satker yang terdapat temuan yang belum tuntas; (4) membuat surat edaran Kepala Badan kepada pimpinan satker tentang temuan – temuan baik secara administrasi maupun teknis untuk dapat segera menindaklanjuti hingga tuntas; (5) sosialisasi ke satker tentang peraturan jangka waktu penyelesaian hasil pemeriksaan; (6) memberikan saran ke satker lingkup Badan PPSDMP tentang penetapan sanksi administrasi berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 kepada penyebab kerugian negara atau instansi dan pimpinan satkernya yang tidak mau membantu/berupaya untuk penagihan atau penyelesaian kerugian negara tersebut.
- h. Dilakukan pelaksanaan Pengendalian Intern lingkup Badan PPSDMP secara periodik, dimulai dengan penetapan dan pengukuhan Satlak, sosialisasi maturitas, dan gratifikasi, supervisi dan pembinaan;

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan realisasi kegiatan Badan PPSDMP pada tahun 2020, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran kegiatan Badan PPSDMP pada pada umumnya tahun 2020 tercapai dengan maksimal mencapai **Rp.1.043.046.032.642 (98,61%) dari pagu Rp. 1.057.850.961.000**
2. Secara parsial berdasarkan kegiatan, realisasi anggaran tertinggi dicapai oleh Pusat Pelatihan Pertanian sebesar **98,83%**, dan realisasi yang terendah dicapai oleh Pusat Penyuluhan Pertanian sebesar **98,45%**.
3. Berdasarkan realisasi fisik dan keuangan (anggaran) yang dicapai, maka capaian tingkat efisiensi kegiatan BPPSDMP pada tahun 2020 tergolong efisien dengan nilai rasio lebih dari 1, yakni **1,05**.
Secara parsial berdasarkan masing-masing unit kerja, maka capaian tingkat efisiensi pada keempat eselon II lingkup Badan PPSDMP pada tahun 2020 juga termasuk kategori efisien, karena seluruhnya mencapai nilai rasio lebih dari 1, yaitu masing-masing (a) 1,05 pada kegiatan pusat Pelatihan Pertanian; (b) 1,00 pada kegiatan Pusat Penyuluhan Pertanian; (c) 1,01 pada Sekretariat Badan; dan (d) 1,01 pada kegiatan Pusat Pendidikan Pertanian.
4. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Badan PPSDMP tidak mencapai 100 % adanya pemotongan untuk menangani Pandemi Covid 19.. Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2020 mengenai Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2020 Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa "Untuk melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dilakukan perubahan terhadap postur dan rincian APBN Tahun Anggaran 2020."

B. Saran

Perbaikan ke depan sebagai langkah antisipasi menyikapi permasalahan yang terjadi di tahun 2020 antara lain:

1. Lebih cermat dalam proses perencanaan (lokasi, SDM);
2. Lebih cermat dalam memperkirakan kegiatan yang bersifat koordinasi baik internal maupun eksternal;
3. Lebih cermat dalam merancang kegiatan pengadaan dan menepati jadwal proses pengadaan, lebih disiplin baik lokasi maupun waktu pelaksanaan kegiatan;
4. Meningkatkan koordinasi yang lebih dalam penjadwalan kegiatan antar bagian lingkup BPPSDMP;
5. Lebih selektif dalam mengundang peserta; lebih cermat dalam menyusun perencanaan kegiatan yang melibatkan pihak ketiga;
6. Lebih intensif dalam pengendalian internal.

BAB VI PENUTUP

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian memiliki fungsi ekonomi dan fungsi pendidikan. Tahun 2020, fungsi tersebut diwujudkan melalui Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian serta Program Pendidikan Menengah Pertanian. Kegiatan utama yang dilaksanakan meliputi: (1) Pusat Penyuluhan Pertanian; (2) Pusat Pelatihan Pertanian; (4) Pusat Pendidikan

Pertanian; serta (5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.

Realisasi serapan anggaran program dan kegiatan Badan PPSDMP pada tahun 2020, secara menyeluruh mencapai 98,61%, yaitu sebesar Rp 1.043.046.032.642,- dari total alokasi pagu anggaran sebesar Rp 1.057.850.961.000,-

Pencapaian realisasi fisik kegiatan Badan PPSDMP pada tahun 2020 adalah sebesar pada kisaran 99,61% - 104.86% Dalam pencapaian pelaksanaan kegiatan tersebut Badan PPSDMP didukung oleh satker Pusat Penyuluhan Pertanian, Pusat Pelatihan Pertanian, Pusat Pendidikan Pertanian, dan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.

Selain itu, dukungan dari berbagai pemangku kepentingan lain juga menjadi salah satu faktor kunci pencapaian kegiatan pada tahun 2020 dalam pelaksanaan setiap kegiatan utama mempunyai permasalahan/kendala dan telah direkomendasikan tindak lanjut yang dapat dilakukan sebagai solusi permasalahan tersebut. Hal hal yang disampaikan dalam Laporan Tahunan ini menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk melaksanakan kebijakan penyuluhan dan pengembangan SDM Pertanian mendatang.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Badan PPSDMP

Lampiran 2. Data Kepegawaian Badan PPSDMP

Lampiran 3. Data Jabatan Fungsional